LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2023

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN NGANJUK

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2023. Laporan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penghargaan dan ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk yang telah menunjukkan dedikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk guna memberikan penjelasan secara komprehensive mengenai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023.

Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan referensi untuk pembangunan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

Nganjuk, 16 Januari 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

NAFHAN TOHAWI, S.H. M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 199803 1 005

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pemerintah wajib untuk lebih *aware* terhadap isu-isu strategis yang berkembang terkait dengan isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk. Isu-isu strategis yang muncul dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berhubungan dengan peningkatan jumlah akseptor KB Baru dan Aktif dalam Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Percepatan Penurunan Stunting, Pemberian sosialisasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui kegiatan Roadshow GenRe Millenial ke Satuan Pendidikan seperti SMA, Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren dan Lembaga Sosial/Kemasyarakatan secara berkala yang dilaksanakan bersama Ikatan Generasi Berencana Anjuk Ladang (IGRAL) yaitu wadah dari Generasi Berencana (GENRE), Satuan Karya Keluarga Berencana (Saka Kencana), dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) serta optimalisasi Pembinaan dan Pelatihan bagi Akseptor KB guna meningkatkan pendapatan ekonomi dan kualitas hidup keluarga melalui Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA Isu-isu strategis tersebut menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk. Dengan begitu Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat berjalan optimal sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan LKJIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

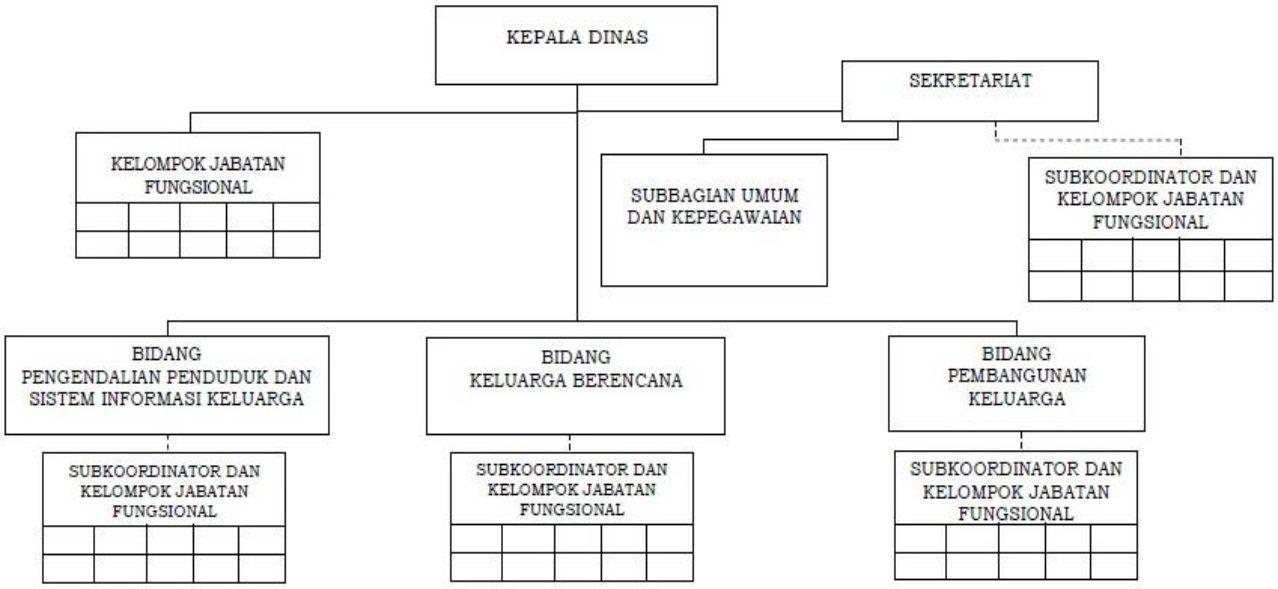
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 02);
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
23. Surat Edaran Nomor 069/2195/411.000/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

1.3.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk mengacu pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Berikut ini adalah Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan instansi pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menangani urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk meliputi:

1.3.2. Sumber Daya

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk mempunyai potensi sumber daya manusia yang berasal dari lingkup pemerintah daerah dan Pendayagunaan Tenaga Fungsional Penyuluh KB dari pusat (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN). Adapun jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3.2
Data ASN menurut Pangkat/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Pemda	Pusat (Penyuluh KB)	
				PNS	PPPK
1.	Pengatur Muda	IIa	-	-	-
2.	Pengatur Muda Tk.I	IIb	-	-	-
3.	Pengatur	IIc	2	-	-
4.	Pengatur Tk.I	IId	4	-	-
5.	Penata Muda	IIIa	2	1	-
6.	Penata Muda Tk.I	IIIb	2	20	-
7.	Penata	IIIc	1	5	-

No	Pangkat	Golongan	Pemda	Pusat (Penyuluh KB)	
				PNS	PPPK
8.	Penata Tk.I	IIId	9	18	-
9.	Pembina	IVa	2	-	-
10.	Pembina Tk.I	IVb	1	5	-
11.	Pembina Utama Muda	IVc	1	6	-
12.	-	VII	-	-	1
13	-	IX	-	-	4
Jumlah			**24**	**55**	**5**

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita lihat bahwa potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk masih belum mencukupi dari segi jumlah pegawai dengan beban kerja yang semakin meningkat. Dari jumlah Penyuluh KB yang ada di Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk yaitu sejumlah 60, dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 284 desa, setiap 1 Penyuluh KB idealnya membawahi 1 desa tetapi kondisi saat ini 1 Penyuluh KB membawahi 2 sampai 5 desa.

Berikut ini kami sajikan Data Jumlah ASN menurut jenis jabatan dan jenjang pendidikan terakhir pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk hingga akhir tahun 2023.

Tabel 1.3.2.1
Data ASN menurut Jenis Jabatan

No.	Perangkat Daerah/Kecamatan	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum
1.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	7	12
TOTAL PEGAWAI		**24**		

Tabel 1.3.2.2
Data ASN menurut Jenjang Pendidikan Terakhir

No.	Perangkat Daerah/ Kecamatan	Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir					
		SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2
1.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	5	2	11	6
TOTAL PEGAWAI		**24**					

1.3.3. Tugas Pokok

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk yaitu :

"Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK)"

1.3.4. Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
b. Perumusan kebijakan teknis pada Program Pengendalian Penduduk;
c. Perumusan kebijakan teknis daerah pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
d. Perumusan kebijakan teknis daerah pada Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bagi Akseptor;
e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bagi Akseptor;
f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang KKBPK;
g. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan penggerakan, pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang KKBPK; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

a. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas :

memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
4. Pembinaan aparatur;
5. Pengelolaan urusan kepegawaian;
6. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
7. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
8. Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
9. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Melaksanakan urusan persuratan;
2. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
4. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
5. Melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
6. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga menyelenggarakan fungsi:

1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah;
3. Perumusan kebijakan teknis program pengendalian penduduk;
4. Perencanaan kegiatan pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;
5. Penyiapan bahan koordinasi keterpaduan progam tentang pengendalian penduduk;
6. Perencanaan pelaksanaan pemutakhiran data keluarga;
7. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga;
8. Pemantauan atas progam dan kegiatan pengendalian penduduk;
9. Perumusan kebijakan teknis yang di integrasikan melalui progam kependudukan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, menganalisis dan menyelenggarakan Program Pembinaan Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana meliputi penggerakan, Penyediaan alokon pada pelayanan kontrasepsi dan pengayoman pasca pelayanan, Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
4. Penyediaan sarana dan prasarana pada program keluarga berencana;
5. Pelaksanaan pembinaan institusi masyarakat pendukung program keluarga berencana;
6. Penyusunan strategi program rintisan untuk pelayanan keluarga berencana di wilayah khusus;
7. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB;
8. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah pada program pembinaan KB;

9. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bidang Pembangunan Keluarga

Bidang Pembangunan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pada program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bagi akseptor KB.

Bidang Pembangunan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pada program pemberdayaan dan peningkatan KS;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis pada program pemberdayaan dan peningkatan KS;
3. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. Pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan atas program kegiatan pemberdayaan dan peningkatan KS;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan tugasnya.

1.4. ISU-ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUED)

Beberapa isu-isu strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk yang menjadi skala prioritas adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kebijakan pemerintah daerah untuk menekan kasus kelahiran perempuan dibawah usia 21 tahun.
2. Kesadaran masyarakat untuk mengendalikan kelahiran semakin meningkat.
3. Dukungan pemerintah dan peran masyarakat dalam menekan unmeet need semakin kuat.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

1.2. Landasan Hukum;

1.3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi;

1.4. Isu - Isu Strategis (*Strategic Issued*);

1.5. Sistematika Penulisan;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Ikhtisar/Ringkasan Renstra/Renja;

2.2. Perjanjian Kinerja;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. IKHTISAR/RINGKASAN RENSTRA/RENJA

2.1.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk

   Berdasarkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya maka perlu adanya RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

   Pemerintah Kabupaten Nganjuk harus menetapkan kebijakan dan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi penduduk untuk membentuk jati dirinya secara profesional dan bertanggung jawab dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi kontrol, dalam pengambilan keputusan, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan.

   Secara konseptual tujuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senantiasa bermuara kepada tercapainya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara dan sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai simpul jejaring akselerasi kesejahteraan masyarakat, tepatnya pada ***misi ke-3 yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas".*** Dari Misi ke-3 Kepala Daerah tersebut dijabarkan ke dalam tujuan "Meningkatnya Pengendalian Penduduk".

2. Sasaran

   Dari tujuan yang telah ditentukan, kemudian dijabarkan dalam bentuk sasaran yang mudah terukur dengan rumusan-rumusan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

   Tujuan "Meningkatnya Pengendalian Penduduk". Dijabarkan dalam sasaran "Terwujudnya Keluarga Berencana yang Berkualitas".

3. Strategi Pembangunan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk.

Strategi pembangunan ini diarahkan sebagai upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana, serta pengembangan dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga :
   a. Pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk.
   b. Peningkatan pelaksanaan pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal atau melalui kelompok kegiatan.
   c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam melakukan analisis/kajian kebijakan, sosialisasi dan advokasi.
   d. Memanfaatkan berbagai media dan sarana untuk melakukan advokasi.
   e. Penguatan sistem pengelolaan data dan informasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga.
   f. Peningkatan komitmen, stakeholders tentang pengendalian penduduk.
   g. Menguatnya kelembagaan pembangunan bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).
   h. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
   i. Pengembangan dan pelaksanaan sub sistem pencatatan dan pelaporan diarahkan untuk data dan informasi yang cepat, lengkap dan akurat yang berbasis teknologi melalui :
      - Pembakuan sub sistem pencatatan dan pelaporan.
      - Operasional pengumpulan data secara cepat, lengkap dan akurat.
      - Penyusunan dan penyajian data laporan secara teratur.

2) Bidang Keluarga Berencana
   a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan KB MKJP .
   b. Peningkatan kesertan KB Pria.
   c. Peningkatan kualitas melalui penguatan tenaga dan fasilitas pelayanan KB statis dan dinamis di Faskes KB pemerintah dan swasta.
   d. Peningkatan akses pelayanan KB minimal 1 desa terdapat 1 Faskes KB.
   e. Ketersediaan alokon di masing-masing Faskes Pemerintah dan Swasta.
   f. Peningkatan peserta KB baru bagi penerima manfaat BPJS (Peserta KB pasca persalinan/pasca keguguran) atau sumber jaminan pembiayaan lainnya.

g. Peningkatan kesertaan KB baru pasca persalinan dan keguguran di RS baik Pemerintah maupun Swasta.
h. Peningkatan pelayanan KB terhadap unmet need (PUS belum KB).
i. Perluasan jejaring kemitraan adanya Komite KB Mandiri, melalui masyarakat peduli KB.
j. Peningkatan sosialisasi, promosi dan konseling peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi dan anak (KHIBA) melalui KB.
k. Peningkatan sosialisasi, promosi dan konseling pencegahan IMS, HIV dan AIDS (Kondom Dual Protection), KAR, pelayanan IUD Plus Papsmear/IVA dan penanggulangan infertilitas sekunder.
l. Pelayanan KB Medis Operasi melalui interfal di Rumah Sakit yang sudah bekerjasama dengan BPJS.

3) Bidang Pembangunan Keluarga :
a. Mempertajam segmentasi sasaran Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS).
b. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan sampai pada tahap realisasi program.
c. Memfasilitasi, monitoring dan evaluasi program yang mengarah pada pencapaian sasaran.
d. Meningkatkan pemahaman secara menyeluruh pada remaja terkait dengan program generasi berencana.
e. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).
f. Meningkatkan pemahaman orang tua tentang fungsi keluarga dan pembangunan keluarga.
g. Meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.
h. Memfasilitasi integrasi lintas sektor program BANGGA KENCANA di Kampung KB.

4. Arah Kebijakan

Strategi yang dijelaskan sebelumnya merupakan upaya serius yang akan dilakukan oleh Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk dalam menunjang program pemerintah pusat maupun daerah. Strategi yang tertuang tersebut merupakan runtutan secara teknis dari arah kebijakan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk dalam merumuskan program dan Kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem informasi keluarga, Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Pembangunan Keluarga.

Adapun arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk :

a. Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga ditekankan pada :
    1. Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas.
    2. Penyediaan data parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait.
    3. Pemanfaatan parameter kependudukan oleh pemangku kepentingan untuk penyusunan perencanaan pembangunan.
    4. Sinkronisasi kebijakan pembangunan kependudukan antara pusat dan daerah.
b. Revitalisasi Program KB :
    1. Pembinaan dan peningkatan kesertaan dan kemandirian ber-KB.
    2. Promosi dan Penggerakan masyarakat untuk turut serta dalam program BANGGA KENCANA
    3. Pengembangan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk .
    4. Peningkatan pemanfaatan SIM berbasis teknologi informasi.
    5. Pelatihan penelitian dan pengembangan program BANGGA KENCANA
    6. Peningkatan kualitas manajemen program dan kegiatan.
    7. Mempertahankan angka kelahiran (TFR).
c. Bidang Pembangunan Keluarga ditekankan pada :
    1. Memaksimalkan advokasi dan penggalangan komitmen yang mendukung pencapaian target kelompok.
    2. Meningkatkan dan memantapkan SDM pengelola program pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga.
    3. Meningkatkan koordinasi dengan program-program lain untuk menunjang peningkatan ketahanan keluarga.
    4. Merevitalisasi program-program terpadu lintas sektor di tingkat lini lapangan untuk menunjang program.

Berikut adalah kebijakan umum pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 :

1. Meningkatkan kualitas keluarga melalui peningkatan akses pelayanan KB kepada masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan KB sesuai standar SOP.
4. Meningkatkan kesertaan ber KB.

5. Penguatan program pembangunan keluarga berkualitas.
6. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang bekerjasama dengan Kemenag dan Dinas Pendidikan.

2.1.2. RENCANA KERJA (RENJA)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka dilakukan penetapan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rencana Kerja merupakan penjabaran atas Rencana Strategis (RENSTRA), sehingga seluruh pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk dapat lebih terarah dan fokus terhadap pencapaian RENSTRA.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dalam tahapan perencanaan kinerja, langkah awal yang dilakukan adalah perumusan target kinerja. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah ditetapkan. Target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dan Rencana Aksi Upaya Pencapaian Target/Sasaran RPJMD dan RENSTRA Tahun 2018-2023, serta dengan memperhatikan pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana yang telah dirumuskan bersama, dengan merujuk pada Visi Misi Kepala Daerah dan kemudian di turunkan menjadi sasaran dan tujuan SKPD seperti yang tertuang diatas, maka guna tercapainya sasaran dan tujuan tersebut dibutuhkan alat ukur yang *"SMART"* agar tujuan dan sasaran strategis dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat terwujud dan terlaksana secara paripurna.

Berikut ini kami tampilkan tujuan, sasaran, indicator sasaran dan target serta program dan pendanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2023
1	Meningkatnya pengendalian penduduk	Terwujudnya Keluarga Berencana yang berkualitas	1.1 *Total Fertility Rate* (TFR) / Angka Kelahiran Total.	2,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2023
			1.2 *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) / Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi.	80,04 %
			1.3 Prosentase Keluarga yang Ber-KB yang Mengikuti kelompok Kegiatan	89,00 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 7.063.239.780	Sumber Dana APBD
2.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 1.159.467.350	Sumber Dana APBD
3.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 14.964.022.300	Sumber Dana APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 6.677.747.800	Sumber Dana APBD

Berdasarkan matriks yang tertera diatas, dapat dijelaskan bahwa apa yang muncul di dalam perencanaan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan hasil *review* dari isu-isu strategis terkait dengan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang diakomodir dalam matriks indikator kinerja utama yang diukur pada setiap tahunnya. Dengan harapan apa yang akan dilakukan, sasaran dan targetnya dapat terpenuhi, sehingga cita-cita dari Dinas PPKB dapat terwujud.

Melihat beberapa indikator diatas, dapat kita jabarkan bahwa untuk Urusan Pengendalian Penduduk berfokus pada upaya menekan angka kelahiran melalui program KB dan untuk Urusan Keluarga Berencana berfokus pada peningkatan jumlah akseptor KB baru dan aktif dalam Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dan meningkatkan Pemberdayaan Keluarga ber-KB melalui Kelompok Kegiatan.

Berikut penjelasan tentang indikator kinerja pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

1. *Total Fertility Rate* (TFR)/Angka Kelahiran Total

Total Fertility Rate (TFR)/Angka Kelahiran Total adalah jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$TFR = 5 \sum_{i=1}^{7} ASFRi$$

Dimana :

ASFRi : angka kelahiran untuk perempuan pada kelompok umur i

i = 1 : kelompok umur 20 – 24 tahun,...., dan i = 7 untuk kelompok umur 45 – 49 tahun

Total Fertility Rate (TFR)/Angka Kelahiran Total digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

2. *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi.

Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100\%$$

Pengukuran tersebut sebagai bentuk upaya untuk mendukung capaian peserta KB aktif. Pengukuran tersebut juga menunjukkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam program KB. Dengan harapan dapat melakukan kontrol capaian target terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Kabupaten Nganjuk.

3. Prosentase Keluarga yang Ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan.

Keluarga yang Ber-KB yang Mengikuti kelompok Kegiatan adalah Keluarga yang ber-KB yang mampu menjalankan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) melalui Kelompok Kegiatan (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor). Dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan yang PUS}}{\text{Jumlah Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan}} \text{ x } 100\%$$

Penjelasan indikator diatas merupakan Indikator Kinerja Utama yang terdapat di RENSTRA yang menjadi indikator kinerja Dinas dan Capaian dari masing-masing indikator tersebut tidak terlepas dari indikator sasaran yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Berikut kami tampilkan indikator sasaran pada RPJMD yang akan dicapai dalam penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

No	Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahun 2023
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,37

Laju Pertumbuhan Penduduk merupakan angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu, yang diukur dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\left(\left(\frac{Pt}{Po}\right)^{\frac{1}{t}} - 1\right) x100$$

Keterangan :

r : Laju Pertumbuhan Penduduk

Pt : Jumlah Penduduk tahun t

Po : Jumlah Penduduk tahun awal

t : Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

Secara konseptual tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senantiasa bermuara kepada tercapainya pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara dan sejalan dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk, tepatnya misi ke-3 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang dijabarkan ke dalam tujuan “Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk “ dengan mengintervensi Pengendalian Jumlah Kelahiran .

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada setiap tahunnnya menjadi skala prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Adapun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk berupaya untuk mengakomodir dan merumuskan tujuan, sasaran yang kemudian diukur melalui indikator kinerja dan ditetapkan dalam sebuah target masing- masing pada tahun berjalan. Dengan terwujudnya tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target pencapaian menunjukkan adanya komitmen yang besar dari Pemerintah Daerah terhadap Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui capaian kinerja pada masing-masing program dan kegiatan.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kabupaten Nganjuk menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat Baik
II	75% sampai 100%	Baik
III	55% sampai 75%	Cukup
IV	Kurang dari 55%	Kurang

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tujuan : Meningkatnya pengendalian penduduk.

Sasaran : Terwujudnya Keluarga Berencana yang berkualitas.

Tabel 3.1.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Terwujudnya Keluarga Berencana yang berkualitas	Indikator Tujuan : Laju Pertumbuhan Penduduk	0,37	0,69	53,62

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
		Indikator Sasaran : 1.1 *Total Fertility Rate* (TFR)/ Angka Kelahiran Total	2,00	1,72	116,28
		1.2 *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	80,04	77,12	96,35
		1.3 Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan	89,00	43,69	49,09

Sumber : Laporan Dalap SIGA Tahun 2023. Download per tanggal 11 Januari 2024.

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Penduduk
   - Jumlah Penduduk pada Tahun 2022 1.117.033
   - Jumlah Penduduk pada Tahun 2023 1.124.693
   - Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk 0,69
   - Target Laju Pertumbuhan Penduduk 0,37
   - Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk 53,62

Secara konseptual tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bermuara kepada tercapainya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara dan sejalan dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk, tepatnya pada misi ke-3 yaitu “Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas“ yang dijabarkan ke dalam tujuan “Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk“ dengan mengintervensi Pengendalian Jumlah Kelahiran.

Jumlah Penduduk pada Tahun 2022 adalah 1.117.033, sedangkan Jumlah Penduduk pada Tahun 2023 adalah 1.124.693, sehingga capaian Laju Pertumbuhan

Penduduk pada Tahun 2023 sebesar 53,62%. Laju Pertumbuhan Penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor data kependudukan yang terdiri dari beberapa kumpulan data, antara lain :

1. Data migrasi masuk
2. Data migrasi keluar
3. Jumlah kelahiran
4. Jumlah kematian

Namun Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk hanya mengintervensi dari sisi Pengendalian Jumlah Kelahirannya.

2. *Total Fertility Rate* (TFR)/Angka Kelahiran Total

- Jumlah Kelahiran	12.447
- Jumlah Wanita Usia Subur (usia 15-49)	264.879
- Realisasi *Total Fertility Rate*	1,72
- Target *Total Fertility Rate*	2,00
- Capaian *Total Fertility Rate*	116,28

Pada Tahun 2023, indikator prosentase pencapaian *Total Fertility Rate (TFR)/*Angka Kelahiran Total tercapai sebesar 116,28%. TFR digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

3. *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi.

- Jumlah Peserta KB aktif	133.414
- Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	172.989
- Realisasi *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)	77,12 %
- Target *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)	80,04 %
- Capaian *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)	96,35 %

Selanjutnya untuk indikator Capaian *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2023 tercapai sebesar 96,35%. Pengukuran tersebut sebagai bentuk upaya untuk mendukung capaian peserta KB aktif. Pengukuran tersebut juga menunjukkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam program KB. Dengan harapan dapat melakukan kontrol capaian target terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Kabupaten Nganjuk.

Pada dasarnya terdapat 4 (empat) faktor yang mempunyai pengaruh besar bagi kesehatan ibu dan anak, yang dikenal dengan istilah "4 Terlalu" (4T), yaitu :

1. Terlalu Muda : Kehamilan dibawah Usia 20 tahun
2. Terlalu Tua : Kehamilan diatas Usia 35
3. Terlalu Dekat : Jarak kehamilan kurang dari 3 tahun
4. Terlalu Banyak : Jumlah Anak yang dilahirkan lebih dari 2 anak

Sangat penting pengetahuan "4 Terlalu" bagi calon ibu ataupun pasangan suami-istri yang sedang merencanakan kehamilan. Hal ini juga merupakan upaya pencegahan untuk dapat menekan angka kematian ibu di Indonesia. Realisasi *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi atau Peserta KB aktif (PUS) tidak bisa tercapai sesuai dengan target karena :

1. Terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin mempunyai anak segera.
2. Karena alasan kesehatan, misalnya Gangguan Hormonal, Alergi dsb.
3. Usia masih dalam range Pasangan Usia Subur (PUS), tetapi yang bersangkutan merasa sudah manopouse.

4. Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan.
   - Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan yang PUS 17.561
   - Jumlah Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan 40.192
   - Realisasi Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan 43,69%
   - Target capaian Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan 89,00%
   - Capaian Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan 49,09%

Sedangkan untuk Indikator Prosentase Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Tahun 2023 tercapai sebesar 49,09% Keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan yang mampu menjalankan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) melalui Kelompok

Kegiatan (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor).

Realisasi Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan tidak bisa tercapai sesuai dengan target karena :

1. Anggota Kelompok Kegiatan belum tentu berstatus Pasangan Usia Subur (PUS).
2. Anggota Kelompok Kegiatan yang berstatus Pasangan Usia Subur (PUS) tetapi ingin mempunyai anak segera.

.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja merupakan wujud dari capaian keberhasilan dari kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk. Dengan pencapaian tersebut, diharapkan kinerja yang ada pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat termotivasi untuk terus melakukan perbaikan. Berikut kami tampilkan :

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Keluarga Berencana yang berkualitas	Indikator Tujuan : Laju Pertumbuhan Penduduk	0,39%	0,38%	0,37%	0,52%	0,66%	0,69%
		Indikator Sasaran : 1.1 *Total Fertility Rate* (TFR)/ Angka Kelahiran Total	2,00 Anak	2,00 Anak	2,00 Anak	1,83 Anak	1,73 Anak	1,72 Anak
		1.2 *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	80,02%	80,03%	80,04%	78,46%	78,17%	77,12%
		1.3 Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan	87,00%	88,00%	89,00%	76,54%	81,29%	43,69%

Sumber : Laporan Dalap SIGA Tahun 2023. Download per tanggal 11 Januari 2024.

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah Penduduk pada Tahun 2022 adalah 1.117.033, sedangkan Jumlah Penduduk pada Tahun 2023 adalah 1.124.693 sehingga capaian Laju Pertumbuhan Penduduk pada Tahun 2023 sebesar 53,62%. Laju Pertumbuhan Penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor data kependudukan yang terdiri dari beberapa kumpulan data, antara lain :

1. Data migrasi masuk
2. Data migrasi keluar
3. Jumlah kelahiran
4. Jumlah kematian

Namun Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk hanya mengintervensi dari sisi Pengendalian Jumlah Kelahirannya.

2. *Total Fertility Rate* (TFR)/Angka Kelahiran Total

TFR adalah jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Sasaran TFR adalah menurunnya Angka Kelahiran Total. Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pencapaian pada tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami perbaikan secara siginifikan. Dapat dikatakan bahwa Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah berhasil dilaksanakan. Hal tersebut dapat kita lihat pada indikator *Total Fertility Rate* (TFR)/Angka Kelahiran Total pada tahun 2021 terealisasi sebesar 1,83 Anak, pada tahun 2022 terealisasi sebesar 1,73 Anak, dan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 1,72 Anak

3. *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi

Pada Tahun 2021 realisasi *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi sebesar 78,46 % atau 144.924 peserta KB aktif dari 184.713 PUS. Pada Tahun 2022 realisasi capaian peserta KB aktif sebesar 78,17 % atau 141.410 peserta KB aktif dari 180.898 PUS, dan pada Tahun 2023 realisasi capaian peserta KB aktif sebesar 77,12 % atau 133.414 peserta KB aktif dari 172.989 PUS.

Dari Tahun 2021 dan 2022, realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 0,29%, Sedangkan pada Tahun 2022 dan 2023 realisasi mengalami penurunan sebesar

1,05%, dan target yang kami tentukan pada Tahun 2023 sebesar 80,04% atau naik sebesar 0,01% dari target Tahun 2022.

Realisasi *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi atau Peserta KB aktif (PUS) tidak bisa tercapai sesuai dengan target karena :

1. Terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin mempunyai anak segera.
2. Karena alasan kesehatan, misalnya Gangguan Hormonal, Alergi dsb.
3. Usia masih dalam range Pasangan Usia Subur (PUS), tetapi yang bersangkutan merasa sudah manopouse.

4. Prosentase Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan

Untuk Indikator Prosentase Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan, realisasi pada Tahun 2021 tercapai sebesar 76,54%, pada Tahun 2022 tercapai sebesar 81,29%, sedangkan pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 43,69 %. Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan adalah Keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan yang mampu menjalankan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) melalui Kelompok Kegiatan (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor).

Realisasi Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan tidak bisa tercapai sesuai dengan target karena :

1. Anggota Kelompok Kegiatan belum tentu berstatus Pasangan Usia Subur (PUS).
2. Anggota Kelompok Kegiatan yang berstatus Pasangan Usia Subur (PUS) tetapi ingin mempunyai anak segera

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra

Tabel 3.1.3.1
Target Kinerja Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya Keluarga Berencana yang berkualitas	Indikator Tujuan : Laju Pertumbuhan Penduduk	0,30%	0,31%	0,39%	0,38%	0,37%
		Indikator Sasaran : 1.1 *Total Fertility Rate* (TFR)/ Angka Kelahiran Total	2,00 Anak	2,00 Anak	2,00 Anak	2,00 Anak	2,00 Anak
		1.2 *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	80,00%	80,01%	80,02%	80,03%	80,04%
		1.3 Prosentase Usia Nikah Pertama di Bawah Usia 21 Tahun	11,60%	11,50%	-	-	-
		1.4 Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan	-	-	87,00%	88,00%	89,00%

Kesesuaian antara perencanaan kinerja dengan target yang akan dicapai merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Oleh sebab itu perencanaan yang baik akan berdampak pada upaya untuk mencapai sebuah realisasi yang baik. Maka, pencapaian tersebut akan menjadi tolok ukur keberhasilan atas implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk. Berikut kami gambarkan Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018-2023 dengan Target Jangka Menengah yang ada dalam RPJMD/RENSTRA :

Tabel 3.1.3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun Akhir Renstra	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Keluarga Berencana yang berkualitas	Indikator Tujuan : Laju Pertumbuhan Penduduk	0,37%	0,69%	53,62%
		Indikator Sasaran : 1.1 *Total Fertility Rate* (TFR)/ Angka Kelahiran Total	2,00 Anak	1,72 Anak	116,28%
		1.2 *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	80,04%	77,12%	96,35%
		1.3 Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan	89,00%	43,69%	49,09%

Sumber : Laporan Dalap SIGA Tahun 2023. Download per tanggal 11 Januari 2024.

Tabel 3.1.3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 - 2023

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					CAPAIAN PADA TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,96	1,88	1,83	1,73	1,72	102,04	106,38	109,29	115,61	116,28
2	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	80,00	80,01	80,02	80,03	80,04	78,66	79,36	78,46	78,17	77,12	98,32	99,19	98,05	97,68	96,35
3	Prosentase usia nikah pertama di bawah usia 21 tahun	11,60	11,50	-	-	-	10,92	7,833	-	-	-	106,23	146,81	-	-	-
4	Prosentase Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan	-	-	87,00	88,00	89,00	-	-	76,54	81,29	43,69	-	-	87,97	92,38	49,09

Sumber : Laporan Dalap SIGA Tahun 2023. Download per tanggal 11 Januari 2024.

Berdasarkan data diatas, tingkat kemajuan pada masing-masing indikator cukup terlihat. Kondisi yang membaik tersebut merupakan kesuksesan dari pelaksanaan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana khususnya dalam memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Konseling program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sehingga masyarakat turut serta dalam aktivitas KB dan berpartisipasi dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA).

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Provinsi/Nasional

Tabel 3.1.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk (%)			Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur (%)		
			2023					2023		
			Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Keluarga Berencana yang berkualitas	1.1 *Total Fertility Rate* (TFR)/ Angka Kelahiran Total	2,00	1,72	116,28	1 Menurunya Angka Kelahiran Total	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,86	1,98	93,94
		1.2 *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	80,04	77,12	96,35	2 Meningkatnya Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	66,5	67,5	101,50
		1.3 Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan	89,00	43,69	49,09					

Sumber : - Laporan Dalap SIGA Tahun 2023. Download per tanggal 11 Januari 2024.
- Infografik Kinerja Utama Bangga Kencana : Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023.

Realisasi Kinerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur adalah realisasi Capaian dari seluruh Kabupaten/Kota.

Tabel 3.1.4.2

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan BKKBN Pusat

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk (%)			Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja BKKBN Pusat (%)		
			2023					2023		
			Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Keluarga Berencana yang berkualitas	1.1 *Total Fertility Rate* (TFR)/ Angka Kelahiran Total	2,00	1,72	116,28	1 Menurunya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate* /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,19	2,14	102,34
		1.2 *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	80,04	77,12	96,35	2 Meningkatnya Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	62,92	60,40	95,99
		1.3 Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan	89,00	43,69	49,09					

Sumber : - Laporan Dalap SIGA Tahun 2023. Download per tanggal 11 Januari 2024.

- Infografik Kinerja Utama Bangga Kencana : Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023

3.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

Tabel 3.1.5
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Keluarga Berencana yang berkualitas	Indikator Tujuan : Laju Pertumbuhan Penduduk	53,62%	Tidak Tercapai
		Indikator Sasaran : 1.1 *Total Fertility Rate* (TFR)/ Angka Kelahiran Total	116,28	Tercapai
		1.2 *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	96,35	Tercapai
		1.3 Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan	49,09	Tidak Tercapai

Sumber : Laporan Dalap SIGA Tahun 2023. Download per tanggal 11 Januari 2024.

Analisis keberhasilan/kegagalan/peningkatan/penurunan pencapaian target kinerja Tahun 2023 serta alternatif solusi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor data kependudukan yang terdiri dari : (1) Data migrasi masuk; (2) Data migrasi keluar; (3) Jumlah kelahiran; dan (4) Jumlah kematian. Namun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hanya mengintervensi dari sisi Pengendalian Jumlah Kelahirannya.

Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk pada Tahun 2023 sebesar 0,69%, dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada nilai pertumbuhan penduduk pada tahun 2023 sebesar 0,32 dari yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 ada penurunan sebesar 0,03.

Solusi atau Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk untuk mengendalikan jumlah kelahiran adalah sebagai berikut :

2. *Total Fertility Rate* (TFR)/Angka Kelahiran Total

TFR adalah jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Sasaran TFR adalah menurunnya Angka Kelahiran Total. Adapun beberapa faktor yang mendorong tercapainya Total Fertility Rate (TFR)/Angka Kelahiran Total antara lain :

- Berkurangnya Pernikahan dini
- Pasangan Usia Subur (PUS) menunda untuk memiliki anak
- Kesadaran akan menggunakan kontrasepsi
- Fokus Karir

Solusi atau Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk untuk mengendalikan jumlah kelahiran adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan KB.
- Sosialisasi mengenai Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) melalui tatap muka dan berbagai media cetak, media massa dan media luar ruang.
- Bekerjasama dengan Dinas Kominfo untuk membantu fasilitasi sosialisasi dan publikasi terkait Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA).
- Fasilitasi Layanan KB pada faskes KB di tiap kecamatan.

3. *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi

Pada dasarnya terdapat 4 (empat) faktor yang mempunyai pengaruh besar bagi kesehatan ibu dan anak, yang dikenal dengan istilah "4 Terlalu" (4T), yaitu :

1. Terlalu Muda : Kehamilan dibawah Usia 20 tahun
2. Terlalu Tua : Kehamilan diatas Usia 35
3. Terlalu Dekat : Jarak kehamilan kurang dari 3 tahun
4. Terlalu Banyak : Jumlah Anak yang dilahirkan lebih dari 2 anak

Beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya Realisasi *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi atau Peserta KB aktif (PUS) adalah adanya kesadaran masyarakat untuk menggunakan alokon dan bisa menggendalikan jumlah kelahiran Sedangkan beberapa factor yang mempengaruhi tidak tercapainya CPR antara lain :

- Terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin mempunyai anak segera.
- Karena alasan kesehatan, misalnya Gangguan Hormonal, Alergi dsb.
- Usia masih dalam range Pasangan Usia Subur (PUS), tetapi yang bersangkutan merasa sudah manopouse.
- Ketidakcocokan alat kontrasepsi yang digunakan
- Kurangnya pengetahuan pra nikah tentang kontrasepsi
- Drop Out (DO) Penggunaan alat dan obat kontrasepsi

Solusi atau Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan kesertaan ber-KB adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Kepesertaan KB.
- Sosialisasi kepada akseptor Pasca Salin agar tetap memakai alat dan obat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi masing-masing akseptor.
- Melakukan motivasi kepada para Penyuluh KB serta Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) guna menggerakan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan dan keberhasilan program KB.
- Memberikan *reward* kepada akseptor KB MOP dan MOW.

4. Prosentase Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan

Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan adalah Keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan yang mampu menjalankan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) melalui Kelompok Kegiatan (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor). Adapun bebrapa factor yang mempengaruhi tidak tercapainya Prosentase Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan, antara lain :

- Anggota Kelompok Kegiatan belum tentu berstatus Pasangan Usia Subur (PUS).
- Anggota Kelompok Kegiatan yang berstatus Pasangan Usia Subur (PUS) tetapi ingin mempunyai anak segera.

- Kurangnya Kesadaran akseptor dalam mengikuti Kelompok Kegiatan (Poktan)

Solusi atau Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk agar tercapainya Prosentase Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan adalah melakukan Sosialisasi dan Pembinaan secara terus menerus terkait dengan Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK R).

3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya yang tepat memang menjadi fokus bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Salah satu sumber daya yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan adalah anggaran yang efisien dan efektif. Berikut kami jabarkan capaian kinerja dengan serapan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk :

Tabel 3.1.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Keluarga Berencana yang berkualitas	1.1 *Total Fertility Rate* (TFR)/ Angka Kelahiran Total	116,28%	989.489.702 (85,34%)	30,94%
		1.2 *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	96,35%	14.020.417.909 (93,69%)	2.66%
		1.3 Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan	49,09%	6.516.744.296 (97,59%)	-48,5%

Sumber : Laporan Dalap SIGA Tahun 2023. Download per tanggal 11 Januari 2024.

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada masing-masing Program pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana. Tingkat efisiensi tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk terlaksananya kegiatan memang difokuskan pada pencapaian sasaran dan kelompok sasaran urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Namun masih ada kinerja program yang belum maksima pada indicator kinerja Keluarga ber-KB yang mengikuti kelompok kegiatan capaiannya masih rendah sehingga perlu adanya upanya untuk memaksimalkan kegiatan yang menunjang indicator tersebut.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga kegiatan bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
2. Mengoptimalkan kinerja untuk mendukung pencapaian sasaran.

3.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan serta solusi/kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Berikut ini kami tampilkan capaian program dan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 :

Tabel 3.1.7
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
1.	Terwujudnya Keluarga Berencana yang berkualitas	Indikator Tujuan : Laju Pertumbuhan Penduduk	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Prosentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah yang Dilaksanakan**	**98,31 %**
		Indikator Sasaran : *Total Fertility Rate* (TFR)/ Angka Kelahiran Total	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen
		Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10 Dokumen

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
		Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	81 Unit
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Persentase Data Pengendalian Penduduk yang sudah valid**	**100 %**
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	4 Kegiatan
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang disusun	12 Laporan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Prosentase capaian peserta KB**	**96,35%**
			Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Kegiatan
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan IMP yang didayagunakan	5160 Kader
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota	Terwujudnya Pengendalian dan Pemakaian Alat dan Obat Kontrasepsi	20 Kecamatan
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Lembaga yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	49 Kampung KB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**1. Prosentase keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)**	**93,88%**
				2. Prosentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)	**54,08%**
				3. Prosentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)	**7,74%**
				4. Prosentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan UPPKA	**39,05%**
				5. Menurunnya persentase pernikahan dibawah usia 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria	**158,87%**
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5 Kelompok Kegiatan

Berdasarkan tabel diatas, berikut ini analisis faktor penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk :

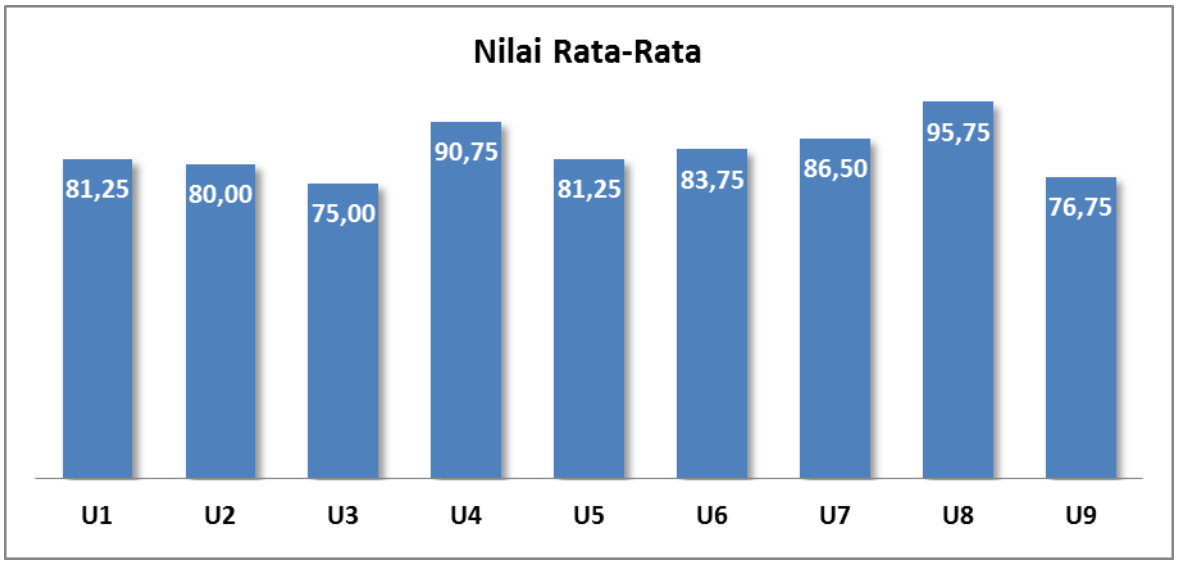
- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator kinerja "Prosentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah yang Dilaksanakan" (Indeks Kepuasan Masyarakat) dengan target pada Tahun 2023 sebesar 84,00 dengan kategori Baik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten pada Tribulan II telah terealisasi sebesar 82,58 dengan kategori Baik dan dari 101 responden, maka diperoleh persentase capaian sebesar 98,31%.

- Perkembangan Capaian Kinerja Per Tribulan

No	Indikator Kinerja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	98,89	98,31	-	-

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah Tribulan II :



U1 : Persyaratan

U2 : Sistem, Mekanisme, Prosedur

U3 : Waktu Penyelesaian

U4 : Biaya/Tarif

U5 : Produk Spesifikasi Jenis Layanan

U6 : Kompetensi Pelaksana

U7 : Perilaku Pelaksana

U8 : Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan

U9 : Sarana dan Prasarana

Dari ke 9 Unsur IKM diatas, posisi kinerja pelayanan terendah ada pada layanan U3 (Waktu Penyelesaian) kemudian pada U9 (Sarana dan Prasarana) dan U2 (Sistem, Mekanisme, Prosedur). Dari analisis tersebut maka diperlukan rencana tindaklanjut dalam perbaikan unsur pelayanan dari Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk antara lain :

- Mempercepat pemberian layanan kepada masyarakat dalam koordinasi dan konsultasi terkait Pelayanan pada Dinas PPKB.
- Mengoptimalkan Kualitas Sarana dan Prasarana
- Memudahkan Mekanisme, Prosedur layanan yang diberikan kepada masyarakat.

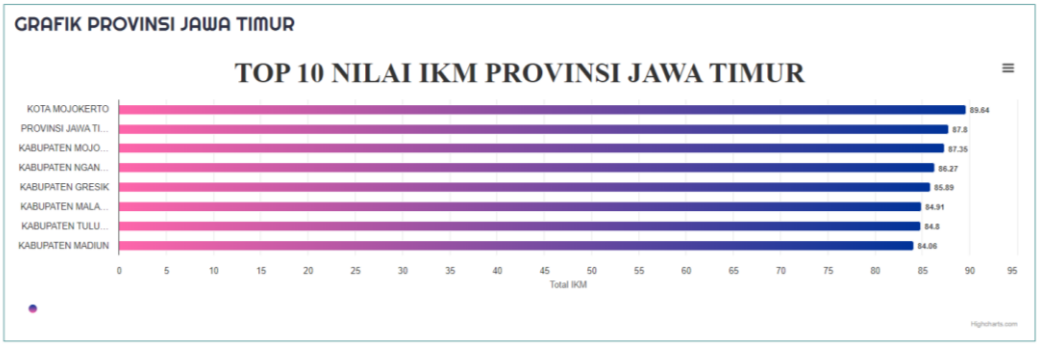
Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 8 dokumen antara lain :
    1. Dokumen Renstra
    2. Dokumen Renja
    3. Dokumen RKA/Perubahan RKA
    4. Dokumen DPA/Perubahan DPA
    5. Dokumen LKJiP
    6. Dokumen LPPD
    7. Dokumen LKPJ
    8. Dokumen SAKIP
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan keluaran Jumlah Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah antara lain Dokumen, administrasi Gaji dan Tunjangan ASN, Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas PPKB.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan keluaran Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu 2 Dokumen Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan biaya jasa instruktur senam bagi pegawai PPKB.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan keluaran Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah sebanyak 12 Dokumen antara lain Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 36 Laporan terkait Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serta Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan keluaran Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara sebanyak 81 unit Kendaraan Dinas Operasional, 15 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya serta 1 unit Gedung Kantor.

Realisasi Keuangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tergolong tinggi dengan capaian 91,05%.

Berikut ini kami sampaikan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menurut E-Sukma Jatim Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 :



RATA-RATA IKM PROVINSI JAWA TIMUR
86.24

Kabupaten / Kota	Nilai Rata-Rata IKM	Responden (Orang)
KOTA MALANG	90.06	4
KOTA MOJOKERTO	89.64	32364
KABUPATEN SUMENEP	89.2	378
KOTA BATU	89.14	21123
KOTA PASURUAN	88.79	15500
KABUPATEN JOMBANG	87.53	22686
KABUPATEN MOJOKERTO	87.35	51313
KABUPATEN KEDIRI	86.33	14488
KABUPATEN NGANJUK	86.27	46229
KOTA BLITAR	86.02	10924
KABUPATEN GRESIK	85.89	50958
KABUPATEN MALANG	84.91	36320
KABUPATEN TULUNGAGUNG	84.8	76191
KABUPATEN PROBOLINGGO	84.64	15441
KABUPATEN BLITAR	84.41	16357
KABUPATEN MADIUN	84.06	34225
KABUPATEN PACITAN	83.9	17691
KABUPATEN MAGETAN	83.63	365
KABUPATEN BANGKALAN	83.43	17419
KABUPATEN JEMBER	83.31	16751

- **Program Pengendalian Penduduk**

Dalam Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dengan indikator kinerja "Prosentase Data Pengendalian Penduduk yang Sudah Valid", target pada Tahun 2023 sebesar 100%. Pada Tribulan IV telah terealisasi 100%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 100%.

- Perkembangan Capaian Kinerja Per Tribulan

No	Indikator Kinerja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Prosentase Data Pengendalian Penduduk yang Sudah Valid	100%	100%	100%	100%

Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, dengan keluaran Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk sebanyak 4 Sub Kegiatan antara lain :
   - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
   - Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
   - Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Nonformal dan Informal
   - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan keluaran Jumlah Laporan Hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang disusun yaitu sebanyak 12 Laporan, yang terdiri dari Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga, Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga dan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

Realisasi Keuangan pada Program Pengendalian Penduduk tergolong tinggi dengan capaian 85,34%.

- **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator kinerja "Persentase Peserta KB Aktif" yaitu Jumlah Peserta KB Aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Pada Tahun 2023, Jumlah Peserta KB Aktif adalah 133.414, sedangkan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) adalah 172.989, maka realisasi Persentase Peserta KB Aktif pada Tahun 2023 sebesar 77,12% dan target pada Tahun 2023 adalah 80,04%, sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 96,35%.

- Perkembangan Capaian Kinerja Per Tribulan

No	Indikator Kinerja	Triwulan I	s/d Triwulan II	s/d Triwulan III	s/d Triwulan IV
1	Persentase Peserta KB Aktif	96,49%	97,23%	97,51%	96,35%

Sumber : Laporan Dalap SIGA Tahun 2023. Download per tanggal 11 Januari 2024

Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan keluaran Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan Sub kegiatan :
   - Pelaksanaan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja.
   - Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.
   - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok).
   - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK.
   - Pengendalian Program KKBPK.
2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan keluaran Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan IMP yang didayagunakan yaitu sebanyak 5160 Kader.

3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan keluaran Terwujudnya Pengendalian dan Pemakaian Alat dan Obat Kontrasepsi sebanyak 20 Kecamatan, dengan Sub kegiatan :
   - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
   - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
   - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP.
   - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB.
   - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, dengan keluaran Jumlah Lembaga yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB sebanyak 49 Kampung Keluarga Berkualitas (KB).

Realisasi Keuangan pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) tergolong tinggi dengan capaian 93,69%.

Proporsi penyerapan anggaran terendah ≤50% pada Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP yang terealisasi sebesar 12,00%. Hal tersebut dikarenakan biaya Ayoman menyesuaikan dengan Akseptor yang mengalami kegagalan pasca pelayanan KB. Berdasarkan realisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak banyak Akseptor yang mengalami kegagalan pasca pelayanan KB.

- **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

  Dalam Pelaksanaan Program Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator, realisasi, target dan capaian kinerja sebagai berikut :
  - Prosentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), telah terealisasi sebesar 79,80%, sedangkan Target pada Tahun 2023 adalah 85,00%, sehingga tercapai sebesar 93,88%

- Prosentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR), telah terealisasi sebesar 45,97%, sedangkan Target pada Tahun 2023 adalah 85,00%, sehingga tercapai sebesar 54,08%
- Prosentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL), telah terealisasi sebesar 6,58%, sedangkan Target pada Tahun 2023 adalah 85,00%, sehingga tercapai sebesar 7,74%
- Prosentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan UPPKA, telah terealisasi sebesar 33,19%, sedangkan Target pada Tahun 2023 adalah 85,00%, sehingga tercapai sebesar 39,05%
- Menurunnya persentase pernikahan dibawah usia 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria, telah terealisasi sebesar 7,05%, sedangkan Target pada Tahun 2023 adalah 11,20%, sehingga tercapai sebesar 158,87%

- Perkembangan Capaian Kinerja Per Tribulan

No	Indikator Kinerja	s/d Triwulan I	s/d Triwulan II	s/d Triwulan III	s/d Triwulan IV
1	Prosentase keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)	105,54%	107,46%	99,04%	93,88%
2	Prosentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)	80,82%	70,45%	85,45%	54,08%
3	Prosentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)	95,59%	83,49%	37,60%	7,74%
4	Prosentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan UPPKA	86,84%	75,52%	83,82%	39,05%

No	Indikator Kinerja	s/d Triwulan I	s/d Triwulan II	s/d Triwulan III	s/d Triwulan IV
5	Menurunnya persentase pernikahan dibawah usia 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria	174,73%	212,93%	144,14%	158,87%

Sumber : Laporan Dalap SIGA Tahun 2023. Download per tanggal 11 Januari 2024.

Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan keluaran Jumlah Kelompok Kegiatan yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebanyak 5 Kelompok Kegiatan, yaitu (1) Bina Keluarga Balita (BKB); (2) Bina Keluarga Remaja (BKR); (3) Bina Keluarga Lansia (BKL); (4) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA); dan (5) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)

Realisasi Keuangan pada Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) tergolong Tinggi dengan capaian 97,59%.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran APBD Tahun 2023 serta dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan penyusunan Laporan Keuangan (LK) Tahun 2023. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Berikut ini kami sajikan Realisasi Anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**29.864.477.230**	**27.957.971.441**	**1.906.505.789**	**93,62**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**7.063.239.780**	**6.431.319.534**	**631.920.246**	**91,05**
A	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**13.297.000**	**13.279.000**	**18.000**	**99,86**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.970.000	2.970.000	-	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.562.500	3.562.500	-	100
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.764.500	6.746.500	18.000	99,73
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.284.324.000**	**3.836.828.141**	**447.495.859**	**89,56**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.278.492.000	3.830.996.141	447.495.859	89,54
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.916.000	2.916.000	-	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.916.000	2.916.000	-	100
C	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**147.097.000**	**142.337.000**	**4.760.000**	**96,76**
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	147.097.000	142.337.000	4.760.000	96,76
D	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**652.118.080**	**594.172.569**	**57.945.511**	**91,11**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.771.792	3.767.500	4.292	99,89
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	273.713.028	265.262.040	8.450.988	96,91
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.949.350	65.545.701	1.403.649	97,90
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.538.910	9.416.975	1.121.935	89,35
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	7.500.000	-	100
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	9.094.650	905.350	90,95
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.965.000	230.905.703	46.059.297	83,37
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.680.000	2.680.000	-	100
E	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**633.000.000**	**575.043.403**	**57.956.597**	**90,84**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.620.000	2.596.000	24.000	99,08
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	111.600.000	105.127.704	6.472.296	94,20
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	518.780.000	467.319.699	51.460.301	90,08
F	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.333.403.700**	**1.269.659.421**	**63.744.279**	**95,22**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.623.300	177.057.325	2.565.975	98,57
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.020.000	34.479.850	12.540.150	73,33
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.106.760.400	1.058.122.246	48.638.154	95,61

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**1.159.467.350**	**989.489.702**	**169.977.648**	**85,34**
A	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**215.125.450**	**198.900.000**	**16.225.450**	**92,46**
1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000	90.431.650	9.568.350	90,43
2	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	49.294.300	45.807.300	3.487.000	92,93
3	Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Nonformal dan Informal	50.831.150	50.446.150	385.000	99,24
4	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	15.000.000	12.214.900	2.785.100	81,43
B	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**944.341.900**	**790.589.702**	**153.752.198**	**83,72**
1	Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	141.421.900	98.565.350	42.856.550	69,70
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (DAU dan DAK Non Fisik)	199.322.500	176.087.324	23.235.176	88,34
3	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (DAK Non Fisik)	216.000.000	166.995.000	49.005.000	77,31
4	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (DAU dan DAK Non Fisik)	387.597.500	348.942.028	38.655.472	90,03

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
3	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**14.964.022.300**	**14.020.417.909**	**943.604.391**	**93,69**
A	**Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**2.145.365.000**	**1.941.449.741**	**203.915.259**	**90,50**
1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (DAK Non Fisik)	371.959.000	325.305.100	46.653.900	87,46
2	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (DAU dan DAK Non Fisik)	470.406.000	454.726.818	15.679.182	96,67
3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (DAK Non Fisik)	260.000.000	259.100.000	900.000	99,65
4	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (DAK Non Fisik)	963.000.000	856.471.323	106.528.677	88,94
5	Pengendalian Program KKBPK (DAK Non Fisik)	80.000.000	45.846.500	34.153.500	57,31
B	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**7.527.833.300**	**7.471.473.450**	**56.359.850**	**99,25**
1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (DAK Non Fisik)	50.000.000	50.000.000	-	100
2	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAU dan DAK Non Fisik)	7.477.833.300	7.421.473.450	56.359.850	99,25
C	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**4.222.324.000**	**3.721.457.218**	**500.866.782**	**88,14**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAU dan DAK Non Fisik)	50.700.000	37.727.702	12.972.298	74,41
2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (DAU dan DAK Non Fisik)	2.138.424.000	1.797.308.416	341.115.584	84,05
3	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	12.500.000	1.500.000	11.000.000	12,00
4	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK Fisik)	2.000.000.000	1.865.153.100	134.846.900	93,26
5	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK Non Fisik)	20.700.000	19.768.000	932.000	95,50
D	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**1.068.500.000**	**886.037.500**	**182.462.500**	**82,92**
1	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (DAK Non Fisik)	9.000.000	-	9.000.000	-
2	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAU dan DAK Non Fisik)	1.059.500.000	886.037.500	173.462.500	83,63
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**6.677.747.800**	**6.516.744.296**	**161.003.504**	**97,59**
A	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**6.677.747.800**	**6.516.744.296**	**161.003.504**	**97,59**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK Non Fisik)	520.000.000	372.980.000	147.020.000	71,73
2	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	202.235.600	193.856.696	8.378.904	95,86
3	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK Non Fisik)	5.355.000.000	5.355.000.000	-	100
4	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	405.457.200	400.675.150	4.782.050	98,82
5	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	195.055.000	194.232.450	822.550	99,58

Persentase Realisasi Anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk sebesar 93,62%. Proporsi penyerapan anggaran terendah ≤50% pada Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP terealisasi sebesar 12,00%. Hal tersebut dikarenakan biaya Ayoman menyesuaikan dengan Akseptor yang mengalami kegagalan pasca pelayanan KB. Berdasarkan realisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak banyak Akseptor yang mengalami kegagalan pasca pelayanan KB.

Adapun beberapa Penghargaan dan Prestasi yang dicapai oleh Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2023, antara lain :

NO	PENGHARGAAN/ PRESTASI	TINGKAT PRESTASI	PENYELENGGARA	DOKUMENTASI
1.	Penghargaan Atas Pencapaian dan Komitmen terhadap Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Nganjuk	Provinsi	BKKBN	
2.	Juara I Lomba Kelompok BKB Terbaik pada Lomba Bangga Kencana dalam rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 ➢ Bina Keluarga Balita (BKB) Dahlia, Desa Jatigreges, Kecamatan Pace, Kab. Nganjuk	Provinsi	BKKBN	

NO	PENGHARGAAN/ PRESTASI	TINGKAT PRESTASI	PENYELENGGARA	DOKUMENTASI
3.	Penghargaan Atas Pencapaian Pelayanan KB 162,55% dalam Rangka World Contraception Day	Provinsi	BKKBN	
4.	Terbaik III Pelayanan KB dalam Rangka World Contraception Day Kategori Kodim dengan KBPP Tertinggi	Provinsi	BKKBN	

NO	PENGHARGAAN/ PRESTASI	TINGKAT PRESTASI	PENYELENGGARA	DOKUMENTASI
5.	Penghargaan Pejuang Zero Stunting	Kabupaten	JAWA POS AWARD	 

BAB IV
PENUTUP

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk telah mampu untuk melakukan pencapaian sasaran, baik dari Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga, Bidang Keluarga Berencana maupun Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Pencapaian sasaran "Terwujudnya Keluarga Berencana yang Berkualitas" pada tahun 2023 diukur oleh beberapa indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. *Total Fertility Rate* (TFR)/Angka Kelahiran Total Tahun 2023 terealisasi sebesar 1,72 Anak dan tercapai 116,28%.
2. *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2023 terealisasi sebesar 77,12% dan tercapai 96,35%.
3. Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Tahun 2023 terealisasai sebesar 43,69% dan tercapai 49,09%.

Upaya-upaya yang akan dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja Dinas PPKB pada tahun tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan personil penyuluh keluarga berencana yang ada.
2. Menyajikan Data Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) yang akurat.
3. Melakukan motivasi kepada para Penyuluh KB serta kader KB guna menggerakan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan dan keberhasilan program KB.
4. Mengoptimalkan keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas disetiap kecamatan bersama lintas sektoral.
5. Meningkatkan Kepesertaan KB MKJP.
6. Memberikan *reward* kepada akseptor KB MOP dan MOW.
7. Peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, kualitas dan kuantitas pelayanan KB berupa pelayanan konseling, KB Medis operasi dan pemasangan alat kontrasepsi.

8. Pemberian sosialisasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada Remaja melalui Kegiatan Roadshow GenRe Millenial.
9. Pembinaan dan pelatihan bagi akseptor KB guna meningkatkan pendapatan ekonomi dan kualitas hidup keluarga melalui Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA).
10. Peningkatan sinergitas dan dukungan Percepatan Penurunan Stunting dengan pihak ketiga.
11. Optimalisasi dan integrasi Sistem Satu Data untuk data Stunting dengan Lintas Sektor.
12. Optimalisasi pelaksanaan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) untuk meminimalisir terjadinya Stunting baru pada Balita.

Demikian LKJIP ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk.

LAMPIRAN

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023

NO.	KECAMATAN	PUS	PER MIX KONTRASEPSI										PREVALENSI (%)	PUS BUKAN KB					
			MKJP					Non MKJP				JUMLAH		JUMLAH	HAMIL	IAS	UNMET NEED		
			IUD	MOW	MOP	IMPL	JUMLAH	KDM	STK	PIL	JUMLAH						IAT	TIAL	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=4+5+6+7*	*9*	*10*	*11*	*12=9+10+11*	*13=8+12*	*14=(13/3) x100*	*15=16+17+18+16*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20=18+19*
1	SAWAHAN	6.072	195	151	12	385	743	70	3.122	976	4.168	4.911	80,88	842	-	530	55	257	312
2	NGETOS	6.037	436	171	7	747	1.361	52	3.121	373	3.546	4.907	81,28	759	-	439	88	232	320
3	BERBEK	10.976	789	320	7	666	1.782	208	5.180	1.150	6.538	8.320	75,80	2.026	-	1.073	297	656	953
4	LOCERET	11.268	1.210	384	17	642	2.253	274	5.014	1.038	6.326	8.579	76,14	2.107	-	1.174	245	688	933
5	PACE	10.294	765	441	12	576	1.794	185	5.234	795	6.214	8.008	77,79	1.838	-	1.000	200	638	838
6	PRAMBON	10.928	499	770	23	942	2.234	333	4.538	1.029	5.900	8.134	74,43	2.182	-	1.226	344	612	956
7	NGRONGGOT	12.797	389	447	24	1.194	2.054	201	7.080	947	8.228	10.282	80,35	1.968	-	1.105	210	653	863
8	KERTOSONO	7.775	702	415	28	541	1.686	287	2.473	1.018	3.778	5.464	70,28	1.698	-	1.049	229	420	649
9	PATIANROWO	6.713	384	281	4	365	1.034	162	3.124	653	3.939	4.973	74,08	1.413	-	668	137	608	745
10	BARON	8.559	598	300	10	478	1.386	211	3.449	806	4.466	5.852	68,37	2.067	-	963	358	746	1.104
11	TANJUNGANOM	18.423	907	884	27	858	2.676	844	7.870	2.603	11.317	13.993	75,95	3.485	-	1.754	489	1.242	1.731
12	SUKOMORO	7.011	566	325	3	315	1.209	154	3.463	456	4.073	5.282	75,34	1.300	-	704	156	440	596
13	NGANJUK	9.622	1.405	531	34	472	2.442	459	3.174	822	4.455	6.897	71,68	2.168	-	1.304	258	606	864
14	BAGOR	10.508	772	326	8	559	1.665	229	5.263	1.166	6.658	8.323	79,21	1.545	-	893	180	472	652
15	WILANGAN	4.746	203	146	4	413	766	40	2.370	407	2.817	3.583	75,50	933	-	477	135	321	456
16	REJOSO	11.220	697	416	9	1.350	2.472	157	5.283	1.289	6.729	9.201	82,01	1.417	-	874	159	384	543
17	GONDANG	9.068	395	186	10	1.054	1.645	233	5.108	725	6.066	7.711	85,04	1.068	1	592	118	357	475
18	NGLUYU	2.255	102	67	1	345	515	51	1.102	348	1.501	2.016	89,40	168	-	110	19	39	58
19	LENGKONG	5.269	598	232	7	309	1.146	99	2.486	449	3.034	4.180	79,33	805	-	456	105	244	349
20	JATIKALEN	3.448	200	143	9	311	663	90	1.529	516	2.135	2.798	81,15	490	-	357	32	101	133
JUMLAH		**172.989**	**11.812**	**6.936**	**256**	**12.522**	**31.526**	**4.339**	**79.983**	**17.566**	**101.888**	**133.414**	**77,12**	**30.279**	**1**	**16.748**	**3.814**	**9.716**	**13.530**

Sumber. Laporan Dalap SIGA Tahun 2023 Download per tanggal 11 Januari 2024

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK

NAFHAN TOHAWI, S.H. M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19621208 199803 1 005

77,12

Nganjuk, 16 Januari 2024

a.n Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
dan Sistem Informasi Keluarga
Penata Kependudukan Dan
Keluarga Berencana Muda

PRADIKLATSAR MADA H, SKM. M. Si
Penata Tingkat I
NIP. 19840913 201001 1 024

USIA NIKAH PERTAMA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	Jumlah Seluruh Perkawinan	UMUR PERKAWINAN							
			≤ 20Th		21 - 25 Th		26 - 30 Th		> 30 Th	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	BAGOR	348	23	6,61	239	68,68	53	15,23	33	9,48
2	BARON	247	4	1,62	103	41,70	138	55,87	2	0,81
3	BERBEK	417	13	3,12	186	44,60	192	46,04	26	6,24
4	GONDANG	453	13	2,87	152	33,55	204	45,03	84	18,54
5	JATIKALEN	230	14	6,09	173	75,22	37	16,09	6	2,61
6	KERTOSONO	459	18	3,92	210	45,75	128	27,89	103	22,44
7	LENGKONG	281	61	21,71	162	57,65	45	16,01	13	4,63
8	LOCERET	533	26	4,88	285	53,47	108	20,26	114	21,39
9	NGANJUK	399	10	2,51	157	39,35	160	40,10	72	18,05
10	NGETOS	193	7	3,63	85	44,04	65	33,68	36	18,65
11	NGLUYU	291	43	14,78	144	49,48	51	17,53	53	18,21
12	NGRONGGOT	473	76	16,07	241	50,95	129	27,27	27	5,71
13	PACE	430	1	0,23	259	60,23	140	32,56	30	6,98
14	PATIANROWO	312	15	4,81	186	59,62	48	15,38	63	20,19
15	PRAMBON	430	36	8,37	258	60,00	91	21,16	45	10,47
16	REJOSO	480	23	4,79	269	56,04	78	16,25	110	22,92
17	SAWAHAN	305	61	20,00	108	35,41	83	27,21	53	17,38
18	SUKOMORO	261	14	5,36	50	19,16	145	55,56	52	19,92
19	TANJUNGANOM	650	53	8,15	383	58,92	111	17,08	103	15,85
20	WILANGAN	132	5	3,79	80	60,61	41	31,06	6	4,55
JUMLAH		**7.324**	**516**	**7,05%**	**3.730**	**50,93%**	**2.047**	**27,95%**	**1.031**	**14,08%**

Sumber. Laporan rutin UKP per tanggal 14 Januari 2024

Nganjuk, 16 Januari 2024

a.n Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
dan Sistem Informasi Keluarga
Penata Kependudukan Dan
Keluarga Berencana Muda

PRADIKLATSAR MADA H, SKM. M. Si
Penata Tingkat I
NIP. 19840913 201001 1 024

JUMLAH KELAHIRAN (LAHIR HIDUP DAN LAHIR MATI)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH LAHIR HIDUP			JUMLAH LAHIR MATI			TOTAL		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Bagor	345	306	651	3	1	4	348	307	655
2	Baron	306	297	603	3	0	3	309	297	606
3	Berbek	345	350	695	1	1	2	346	351	697
4	Gondang	298	324	622	1	3	4	299	327	626
5	Jatikalen	90	98	188	1	2	3	91	100	191
6	Kertosono	336	299	635	3	2	5	339	301	640
7	Lengkong	184	158	342	1	1	2	185	159	344
8	Loceret	423	358	781	2	0	2	425	358	783
9	Nganjuk	466	435	901	2	0	2	468	435	903
10	Ngetos	224	233	457	3	4	7	227	237	464
11	Ngluyu	63	74	137	1	0	1	64	74	138
12	Ngronggot	511	472	983	3	3	6	514	475	989
13	Pace	392	372	764	4	1	5	396	373	769
14	Patianrowo	240	248	488	3	0	3	243	248	491
15	Prambon	428	399	827	0	1	1	428	400	828
16	Rejoso	388	353	741	0	5	5	388	358	746
17	Sawahan	221	236	457	1	3	4	222	239	461
18	Sukomoro	293	233	526	3	1	4	296	234	530
19	Tanjunganom	681	585	1.266	7	3	10	688	588	1.276
20	Wilangan	156	151	307	2	1	3	158	152	310
JUMLAH		**6.390**	**5.981**	**12.371**	**44**	**32**	**76**	**6.434**	**6.013**	**12.447**

Sumber : LB3KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

DAFTAR NAMA PEGAWAI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023

NO.	NAMA LENGKAP	NIP	PANGKAT			NAMA JABATAN
			GOL	NAMA PANGKAT	TMT	
1	2	3	4	5	6	7
1	NAFHAN TOHAWI, SH, MH	197212081998031005	IV/c	Pembina Utama Muda	2019-10-01	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	dr. SUYANTO CIPTO ATMOJO	197212202006041011	IV/b	Pembina Tk. I	2020-10-01	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA
3	SUHARTATIK KUNDARIANA, SST, M.Mkes	196809141989012001	IV/a	Pembina	2021-10-01	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN KELUARGA
4	AGUS ZAINAL ABIDIN, NERS (Ns.), M.Kes	197108231997031003	IV/a	Pembina	2023-04-01	KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA
5	ENDANG SETIANIK, S. Sos	196804012007012023	III/d	Penata Tk. I	2019-04-01	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan)
6	NEISHA DIAN AGRIANNE, S.AB	198408132009032003	III/d	Penata Tk. I	2021-04-01	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda (Penyetaraan)
7	YUDIANI, SE, M.Si	196610121994012001	III/d	Penata Tk. I	2021-04-01	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda (Penyetaraan)
8	ERNA PURWANINGSIH, S.Sos	196905141992032009	III/d	Penata Tk. I	2021-04-01	Pengawas Resi Gudang
9	PREVI KUNCORO SUKMO, S.Kep.Ns.	197905132010011015	III/d	Penata Tk. I	2021-10-01	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Penyetaraan)
10	DUWI WAHYUNI, S.Kep, Ners, MM	197809172010012011	III/d	Penata Tk. I	2021-10-01	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda (Penyetaraan)
11	drg. ALDILLA YOUTHIANA OKTAVANNY, M.A.R.S	198210282014072001	III/d	Penata Tk. I	2022-04-01	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
12	PRADIKLATSAR MADA HANAFI, SKM, M.Si	198409132010011024	III/d	Penata Tk. I	2022-04-01	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Penyetaraan)
13	ENDANG CANDRA RINI,, SE	197703252011012005	III/d	Penata Tk. I	2023-04-01	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Penyetaraan)
14	IKA AGUSTINA, A.Md.Keb.	19870815 200901 2 001	III/c	Penata	2022-04-01	Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
15	ETY KARYAWATI, SE	197008072001122003	III/b	Penata Muda Tk. I	2022-04-01	Analis Keluarga Berencana
16	RITMA WINDARTI, S.KM	197611152003122005	III/b	Penata Muda Tk. I	2023-04-01	Bendahara
17	SUPARMAN	197007031991011001	III/a	Penata Muda	2003-04-01	Pengelola Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana
18	SRI SUPIANI, A. Md, S.Sos	198005102010012026	III/a	Penata Muda	2021-04-01	Pengelola Kepegawaian

NO.	NAMA LENGKAP	NIP	PANGKAT			NAMA JABATAN
			GOL	NAMA PANGKAT	TMT	
1	2	3	4	5	6	7
19	SUYATA	197111262008011003	II/d	Pengatur Tk. I	2020-04-01	Pengemudi
20	ANIK RAHMAWATI	196701212008012007	II/d	Pengatur Tk. I	2020-04-01	Pengadministrasi Kependudukan
21	SUTINIHARTI	196610152010012001	II/d	Pengatur Tk. I	2022-04-01	Pengadministrasi Umum
22	SUPARLAN	196807022009061002	II/d	Pengatur Tk. I	2022-04-01	Pengadministrasi Alat dan Obat Kontrasepsi
23	NANIK NADHIFAH	197011152003122004	II/c	Pengatur	2020-04-01	Pengadministrasi Keuangan
24	SATYA JATI TARAMARDANTI, Amd.A.Pkt	199803282022032003	II/c	Pengatur	2023-09-01	Pengelola Barang Milik Negara

Nganjuk, 16 Januari 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

NAFHAN TOHAWI, S.H. M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 199803 1 005

DATA PENYULUH KB KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2023

No	Nama Lengkap	NIP	Jabatan Akhir	Pangkat Akhir	Golongan Akhir	Status Pegawai	Kecamatan
1	Dra. YULI SETIAWATI	196407021992032006	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya	Pembina Tk.I	IV/b	PNS	Ngetos
2	PRAMONO	196607111991031009	Petugas Lapangan Keluarga Berencana Penyelia	Penata Tk.I	III/d	PNS	Pace
3	ESTHI SETYORINI, SE	196409161984102004	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya	Pembina Utama Muda	IV/c	PNS	Berbek
4	DRS. MOKH. HADI AMINUDIN AZIZ	196501041993121002	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya	Pembina Tk.I	IV/b	PNS	Sawahan
5	Dra. SAMSIAH	196505031993032004	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya	Pembina Tk.I	IV/b	PNS	Loceret
6	BUNTORO, S. SOS	196608241990031009	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya	Pembina Utama Muda	IV/c	PNS	Gondang
7	PURWANTO	196809301989031006	Petugas Lapangan Keluarga Berencana Penyelia	Penata Tk.I	III/d	PNS	Prambon
8	DRA. ENDAH MARTYANINGSIH	196703051991032013	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya	Pembina Tk.I	IV/b	PNS	Bagor
9	ELIS ANUGERAHWATI	196904101990032006	Petugas Lapangan Keluarga Berencana Penyelia	Penata Tk.I	III/d	PNS	Bagor
10	PURWATININGSIH	196904161991032004	Petugas Lapangan Keluarga Berencana Penyelia	Penata Tk.I	III/d	PNS	Prambon
11	DRA. SULISTIYASTUTI	196712041993122003	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya	Pembina Utama Muda	IV/c	PNS	Nganjuk
12	UMI KALSUM,SH	196804211990032015	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya	Pembina Tk.I	IV/b	PNS	Tanjunganom
13	WARSITO	197011101991031005	Petugas Lapangan Keluarga Berencana Penyelia	Penata Tk.I	III/d	PNS	Wilangan
14	ERNI ERMAWATI, SE	196903011995032001	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya	Pembina Utama Muda	IV/c	PNS	Rejoso
15	SUSI PURNAMAWATI	197106201991032005	Petugas Lapangan Keluarga Berencana Penyelia	Penata Muda Tk.I	III/b	PNS	Rejoso
16	AGUS TEJO PRASENO, S.P	196908161995031004	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya	Pembina Utama Muda	IV/c	PNS	Nganjuk
17	Dra. UMI FADILAH KOJIN	196910151993122002	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya	Pembina Utama Muda	IV/c	PNS	Sukomoro
18	AGUSTINA PRIANGGRAINI,SE	197303192011012001	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata Tk.I	III/d	PNS	Pace
19	IDHA SULISTIANA,SE	197512292011012001	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata Tk.I	III/d	PNS	Kertosono
20	CUCUK ARGO NUGROHO, SH	197605092011011002	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata	III/c	PNS	Tanjunganom
21	CAECILIA ENI ERMASARI, S.Pd	197610092011012002	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata Tk.I	III/d	PNS	Ngronggot
22	SAIFUL KARIM, S.PdI	197709152011011006	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata Tk.I	III/d	PNS	Kertosono
23	HERRY DARMAWAN	197710162010011013	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata Tk.I	III/d	PNS	Rejoso
24	EVA KURNIAWATI SISKA WULANDARI,S.A	197809202006042017	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata Tk.I	III/d	PNS	Tanjunganom
25	HARIANTO,SE	197908082011011001	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata Tk.I	III/d	PNS	Bagor

No	Nama Lengkap	NIP	Jabatan Akhir	Pangkat Akhir	Golongan Akhir	Status Pegawai	Kecamatan
26	KARIADI, A.Md	198002072011011005	Petugas Lapangan Keluarga Berencana Penyelia	Penata	III/c	PNS	Sawahan
27	PANJI EKO PRASETYO, S.Sos	198005292010011014	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata Tk.I	III/d	PNS	Gondang
28	ASMORO HADI WIBOWO, S.Si	198006262015041001	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	PNS	Wilangan
29	AHMAD SAIKHU, ST	198012232015041001	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	PNS	Sukomoro
30	SUHARINI, S.PD	198101022015042001	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	PNS	Loceret
31	TETY FARADILAH, S.PD	198103102015042001	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	PNS	Kertosono
32	RENY KIRANA, S.KM	198106262015042001	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	PNS	Lengkong
33	LELLY KURNAWATI, S. Pd	198107032011012005	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	PNS	Baron
34	ENDAH SURYANI, S.Pd	198211172011012007	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata Tk.I	III/d	PNS	Jatikalen
35	TRI WAHYU HARINI, S. Si	198302012015042001	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	PNS	Ngluyu
36	EKA YULI RAHMAWATI, SAB	198307312015042001	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	PNS	Bagor
37	BAMBANG SUGENG, S.AP	198310292010011020	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata Tk.I	III/d	PNS	Loceret
38	DIANING WIDIASI, S.Pd	198403092015042001	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	PNS	Prambon
39	RAHAYU HARTATIK, SE	198404212011012006	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata	III/c	PNS	Gondang
40	LILIK MARFUATIN, S.Sos	198407192019022003	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda	III/a	PNS	Baron
41	EKO BUDI SANTOSO, S.SOS	198501252011011010	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata Tk.I	III/d	PNS	Patianrowo
42	SULFINA MIFTAHULVIA, S.PD	198508032011012008	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	PNS	Baron
43	WAHYU EKA NUGRAINI,S.Pd	198508302015042001	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	PNS	Pace
44	FIAN NURI PRATIWI, S.SOS	198510072011012007	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata	III/c	PNS	Berbek
45	RENY PUSPITA DEWI, S.Pd	198512102015042001	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	PNS	Tanjunganom
46	LINDA RAHAYU, S.PSi	198603252011012011	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata	III/c	PNS	Patianrowo
47	CANDRA PURWANTO, S.Pd	198607092011011008	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata Tk.I	III/d	PNS	Ngronggot
48	ANJILALA YONA SETYA, SH	198707232011011009	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata Tk.I	III/d	PNS	Ngetos
49	ATIK WINARSIH, S. Pd	198904162015042001	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	PNS	Ngronggot
50	ITA DWI PURNAMASARI, ST	198906102015042001	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	PNS	Lengkong
51	TINING SULISTYOWATI, S.Si	198908012015042001	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	PNS	Rejoso
52	HISAN TULUS RABBYALLAH	198909042023211020	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama		IX	PPPK	Ngluyu

No	Nama Lengkap	NIP	Jabatan Akhir	Pangkat Akhir	Golongan Akhir	Status Pegawai	Kecamatan
53	SERSANI DWI NUGROHO, S.Kom	199009192015041001	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	PNS	Berbek
54	IKA INDRIASTUTI SETYANINGSIH, S.KEP	199111162015042001	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	PNS	Nganjuk
55	ALFIAN CAHYO BUDIARDI, S.PD	199303122015041001	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	PNS	Jatikalen
56	MUHAMMAD FAISAL SOFYAN	199309122023211025	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama		IX	PPPK	Lengkong
57	ALLA MARETA	199403142023212037	Petugas Lapangan Keluarga Berencana Terampil		VII	PPPK	Pace
58	AMELIA DYAH KARTIKA SARI, S.KM	199603162019022008	PNS Tugas Belajar	Penata Muda Tk.I	III/b	PNS	Bagor
59	INTAN KUSTIYANA	199610132023212017	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama		IX	PPPK	Berbek
60	SITI MASPUFAH MUNAWAROH, S.Pd.I	199004062023212053	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama		IX	PPPK	Loceret

Nganjuk, 16 Januari 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK



NAFHAN TOHAWI, S.H. M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 199803 1 005

JUMLAH JIWA PEREMPUAN DALAM KELUARGA MENURUT KELOMPOK UMUR
HASIL PENDATAAN KELUARGA

No	Kecamatan	Jumlah Jiwa dalam	JIWA PEREMPUAN DALAM KELUARGA MENURUT KELOMPOK UMUR (TAHUN)															
			0 - < 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Sawahan	18.107	6	635	1.096	1.253	1.256	1.407	1.198	1.204	1.222	1.419	1.401	1.475	1.337	1.105	773	569	751
2.	Ngetos	17.241	11	698	1.214	1.314	1.264	1.320	1.260	1.207	1.297	1.279	1.282	1.318	1.151	896	609	432	689
3.	Berbek	28.132	49	1.022	1.836	2.172	2.098	2.213	2.009	1.882	2.201	2.204	2.080	2.068	1.928	1.466	1.021	711	1.172
4.	Loceret	34.673	13	1.308	2.296	2.743	2.611	2.661	2.375	2.329	2.577	2.787	2.624	2.652	2.428	1.989	1.195	839	1.246
5.	Pace	31.037	70	1.292	2.075	2.346	2.345	2.317	2.046	1.989	2.336	2.563	2.283	2.322	2.089	1.750	1.099	845	1.270
6.	Prambon	34.417	40	1.427	2.325	2.644	2.693	2.677	2.338	2.149	2.552	2.732	2.560	2.535	2.425	1.867	1.280	935	1.238
7.	Ngronggot	38.522	75	1.642	2.727	3.272	3.184	2.971	2.463	2.426	2.869	3.300	2.945	2.845	2.510	1.844	1.243	886	1.320
8.	Kertosono	25.558	15	892	1.753	2.050	2.096	1.887	1.638	1.609	1.761	2.051	1.969	1.979	1.727	1.484	1.043	707	897
9.	Patianrowo	20.372	23	698	1.350	1.620	1.530	1.525	1.328	1.353	1.539	1.592	1.647	1.488	1.370	1.125	831	590	763
10.	Baron	25.603	16	1.161	1.741	2.151	1.957	2.009	1.712	1.682	1.907	2.138	1.864	1.783	1.638	1.361	942	615	926
11.	Tanjunganom	55.571	123	2.371	3.629	4.291	4.278	4.204	3.765	3.469	4.015	4.524	4.161	4.126	3.861	3.069	2.089	1.362	2.234
12.	Sukomoro	21.153	9	788	1.426	1.687	1.553	1.563	1.378	1.448	1.694	1.775	1.626	1.724	1.456	1.147	709	456	714
13.	Nganjuk	31.366	67	1.172	1.961	2.441	2.464	2.365	1.996	1.939	2.171	2.608	2.378	2.512	2.331	1.911	1.334	774	942
14.	Bagor	28.562	4	1.011	1.835	2.157	2.125	2.040	1.843	1.816	2.112	2.383	2.151	2.308	2.110	1.659	1.173	752	1.083
15.	Wilangan	14.175	17	590	910	1.083	978	1.037	897	905	1.057	1.239	1.121	1.124	943	828	586	332	528
16.	Rejoso	33.413	47	1.048	2.056	2.405	2.349	2.423	2.201	2.166	2.394	2.905	2.611	2.630	2.328	1.951	1.495	993	1.411
17.	Gondang	26.140	15	884	1.604	1.935	1.881	1.943	1.747	1.700	1.965	2.145	1.982	1.917	1.815	1.568	1.117	783	1.139
18.	Ngluyu	6.550	0	147	299	419	407	476	432	371	419	573	531	543	489	426	373	259	386
19.	Lengkong	16.238	54	657	1.033	1.208	1.172	1.148	1.073	1.028	1.092	1.317	1.121	1.180	1.146	1.069	755	493	692
20.	Jatikalen	10.171	53	349	655	700	665	745	700	727	707	748	738	791	761	629	441	286	476
KABUPATEN		**517.001**	**707**	**19.792**	**33.821**	**39.891**	**38.906**	**38.931**	**34.399**	**33.399**	**37.887**	**42.282**	**39.075**	**39.320**	**35.843**	**29.144**	**20.108**	**13.619**	**19.877**
							38.906	**38.931**	**34.399**	**33.399**	**37.887**	**42.282**	**39.075**						
							JUMLAH WUS						**264.879**						

Sumber : Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Tahun 2023

Nganjuk, 16 Januari 2024

a.n Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
dan Sistem Informasi Keluarga
Penata Kependudukan Dan
Keluarga Berencana Muda

PRADIKLATSAR MADA H, SKM. M. Si
Penata Tingkat I
NIP. 19840913 201001 1 024

DOKUMENTASI KEGIATAN

UPAYA-UPAYA PERBAIKAN DAN PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA DINAS PPKB

1. Melakukan motivasi kepada Penyuluh KB serta Kader KB guna menggerakan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan dan keberhasilan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA)

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PROGRAM BANGGA KENCANA DENGAN PENYULUH KB







PENGGERAKAN KADER IMP (PPKBD DAN SUB PPKBD)
DI KECAMATAN NGRONGGOT







KEGIATAN KOORDINATOR PELAPORAN DAN PENCATATAN KECAMATAN SE KABUPATEN NGANJUK (DISKUSI PANEL)



KEGIATAN KOORDINATOR PELAPORAN DAN PENCATATAN KECAMATAN SE KABUPATEN NGANJUK



KEGIATAN HARGANAS KE 30 DAN HUT KEMERDEKAAN RI KE 78

TAHUN 2023







2. Memberikan *reward* kepada akseptor KB

PEMBERIAN REWARD KEPADA AKSEPTOR KB MOW DAN MOP





3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, kualitas dan kuantitas pelayanan KB berupa pelayanan konseling, KB Medis operasi dan pemasangan alat kontrasepsi.

KEGIATAN PELAYANAN KB MKJP DENGAN BUS KELILING





KEGIATAN BAKTI SOSIAL PELAYANAN KB
METODE OPERASI PRIA (MOP) DAN METODE OPERASI WANITA (MOW)
DI RSD NGANJUK (10 JUNI 2023)













KEGIATAN PELAYANAN KB
METODE OPERASI PRIA (MOP) DAN METODE OPERASI WANITA (MOW)
DALAM RANGKA HARGANAS (25 JUNI 2023)








KEGIATAN PELAYANAN KB IUD / IMPLAN
DALAM RANGKA HARI JADI KABUPATEN NGANJUK
DI KECAMATAN GONDANG





KEGIATAN PELAYANAN KB IUD DAN IMPLAN
DALAM RANGKA HARI KELUARGA NASIONAL YANG KE-30
DI KECAMATAN PATIANROWO







DOKUMENTASI PELAYANAN KB IUD DAN IMPLAN
DALAM RANGKA HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE- 78
DI KECAMATAN TANJUNGANOM







KEGIATAN EVALUASI PROGRAM KB DAN KETERSEDIAAN STOK ALKON DI RUANG PERTEMUAN CANDI LOR KABUPATEN NGANJUK







4. Pemberian sosialisasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada Remaja.

KEGIATAN ROADSHOW GENRE MILLENIAL

- **SMAN 1 GONDANG**







- **SMAN 1 PRAMBON**







- **SMAN 1 KERTOSONO**







KEGIATAN PEMBEKALAN DUTA GENERASI BERENCANA (GENRE)







KEGIATAN GRAND FINAL DUTA GENERASI BERENCANA (GENRE) DI GEDUNG WANITA KABUATEN NGANJUK







KEGIATAN SOSIALISASI GENRE

DAN PEMBINAAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R)







5. Pembinaan dan pelatihan bagi akseptor KB guna meningkatkan pendapatan ekonomi dan kualitas hidup keluarga melalui Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS).

KEGIATAN PELATIHAN MEMBUAT MAKANAN OLAHAN
BAGI KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)







KEGIATAN SOSIALISASI DAN WORKSHOP
PENINGKATAN MENU ASUPAN GIZI DAN MEMANDIKAN BAYI
DI GEDUNG WANITA KABUPATEN NGANJUK







KEGIATAN SEKOLAH ORANG TUA HEBAT (SOTH)







WISUDA SEKOLAH ORANG TUA HEBAT (SOTH) KARTINI

DESA BALONGASEM KECAMATAN JATIKALEN





KEGIATAN SEKOLAH LANSIA TANGGUH (SELANTANG)



KEGIATAN WISUDA SEKOLAH LANSIA TANGGUH (SELANTANG)









6. Mengoptimalkan keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas disetiap kecamatan bersama lintas sektoral, dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

KEGIATAN LAUNCHING KAMPUNG KB DI TAMAN WISATA DESA CENGKOK





KEGIATAN PERTEMUAN EVALUASI PROGRAM KAMPUNG KB DI RUANG PERTEMUAN CANDI LOR KABUPATEN NGANJUK







7. Percepatan Penurunan Stunting

KEGIATAN DISEMINASI AUDIT KASUS STUNTING
DI RUANG ANJUK LADANG








bkkbn
DESIMINASI
AUDIT KASUS STUNTING KE-2
DI KABUPATEN NGANJUK
Selasa, 28 November 2023
Ibu Hamil


bkkbn
DESIMINASI
AUDIT KASUS STUNTING KE-2
DI KABUPATEN NGANJUK
Selasa, 28 November 2023
GRAFIK PANJANG BADAN/TINGGI BADAN MENURUT UMUR


DISEMINASI AUDIT
KASUS STUNTING 2

KOMPETISI FILM PENDEK PENCEGAHAN STUNTING



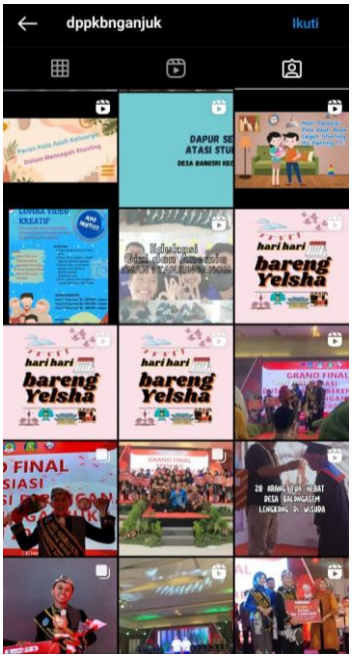


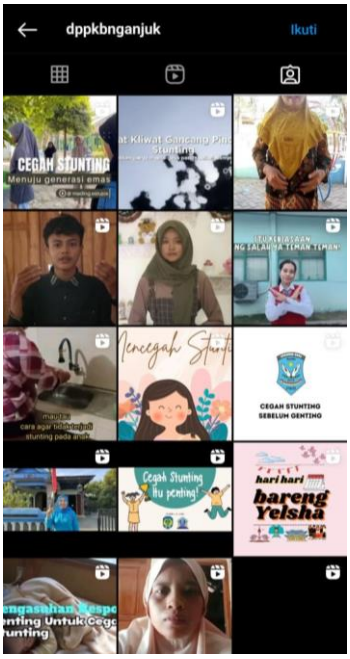


LOMBA VIDEO KREATIF PENCEGAHAN STUNTING

DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARGANAS KE 30 TAHUN 2023











PENGADAAN BINA KELUARGA BALITA (BKB) KIT STUNTING







PENGADAAN BINA KELUARGA BALITA (BKB) KIT STUNTING REGULER





KEGIATAN PENDAMPINGAN SASARAN CATIN, KELUARGA BERESIKO DAN BALITA STUNTING OLEH TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK)











EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGANJUK
TRIWULAN IV TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk yang mengacu pada sasaran RKPD :
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 - 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit Penanggungjawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		12		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terwujudnya Keluarga Berencana yang Berkualitas	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**																						
		Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
1		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**Prosentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah yang Dilaksanakan**	**84,00 Nilai**	**13.340.005.492**	**95,56 Nilai**	**10.922.186.389,07**	**84,00 Nilai**	**7.063.239.780**	**83,07 Nilai**	**632.449.536**	**82,58 Nilai**	**1.489.264.624**	**- Nilai**	**1.150.761.015**	**- Nilai**	**3.158.844.359**	**98,31**	**6.431.319.534**	**193,87**	**17.353.505.923**	**230,80**	**130,09**	**DPPKB**
A		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang**	**41 Dokumen**	**27.300.000**	**33 Dokumen**	**38.630.050**	**8 Dokumen**	**13.297.000**	**- Dokumen**	**-**	**4 Dokumen**	**6.532.500**	**- Dokumen**	**-**	**4 Dokumen**	**6.746.500**	**8**	**13.279.000**	**41**	**51.909.050**	**100**	**190,14**	**DPPKB**
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	7.350.000	9 Dokumen	6.127.250	2 Dokumen	2.970.000	- Dokumen	-	2 Dokumen	2.970.000	- Dokumen	-	- Dokumen	-	2	2.970.000	11	9.097.250	100	123,77	DPPKB
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	10 Dokumen	7.350.000	8 Dokumen	3.694.600	2 Dokumen	3.562.500	- Dokumen	-	2 Dokumen	3.562.500	- Dokumen	-	- Dokumen	-	2	3.562.500	10	7.257.100	100	98,74	DPPKB
3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	12.600.000	16 Laporan	28.808.200	4 Laporan	6.764.500	- Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	4 Laporan	6.746.500	4	-	20	28.808.200	100	228,64	DPPKB
B		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**51 Dokumen**	**6.583.949.492**	**41 Dokumen**	**7.296.737.775**	**10 Dokumen**	**4.284.324.000**	**- Dokumen**	**459.431.729**	**- Dokumen**	**1.097.890.431**	**5 Dokumen**	**918.171.627**	**5 Dokumen**	**1.361.334.354**	**10**	**3.836.828.141**	**51**	**11.133.565.916**	**100,00**	**169,10**	**DPPKB**
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang	6.555.296.992	31 Orang	7.277.293.275	31 Orang	4.278.492.000	31 Orang	459.431.729	31 Orang	1.097.890.431	31 Orang	915.255.627	31 Orang	1.358.418.354	31	3.830.996.141	31	11.108.289.416	100	169,46	DPPKB
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	25 Laporan	14.352.500	20 Laporan	10.621.000	5 Laporan	2.916.000	- Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	5 Laporan	2.916.000	5	2.916.000	25	13.537.000	100	94,32	DPPKB
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	25 Laporan	14.300.000	20 Laporan	8.823.500	5 Laporan	2.916.000	- Laporan	-	- Laporan	-	5 Laporan	2.916.000	- Laporan	-	5	2.916.000	25	11.739.500	100	82,09	DPPKB
C		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**100 %**	**47.250.000**	**100 %**	**4.464.000**	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	**100**	**4.464.000**	**100**	**9,45**	DPPKB
1		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya tertib administrasi aset	100 %	47.250.000	100 %	4.464.000	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	100	4.464.000	100	9,45	DPPKB
D		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**2 Dokumen**	**327.362.000**	**2 Dokumen**	**109.709.500**	**2 Dokumen**	**147.097.000**	**- Dokumen**	**-**	**- Dokumen**	**600.000**	**1 Dokumen**	**2.200.000**	**1 Dokumen**	**139.537.000**	**2**	**142.337.000**	**1**	**252.046.500**	**50,00**	**76,99**	**DPPKB**
1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	120.427.000	4 Paket	5.827.500	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	4	5.827.500	100	**4,84**	
2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	206.935.000	99 Orang	103.882.000	99 Orang	147.097.000	- Orang	-	99 Orang	600.000	31 Orang	2.200.000	31 Orang	139.537.000	31	142.337.000	31	246.219.000	100	118,98	DPPKB
E		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**159 Dokumen**	**2.424.264.000**	**126 Dokumen**	**1.163.132.719**	**12 Dokumen**	**652.118.080**	**3 Dokumen**	**46.184.520**	**3 Dokumen**	**159.271.275**	**3 Dokumen**	**61.980.903**	**3 Dokumen**	**326.735.871**	**12**	**594.172.569**	**138**	**1.757.305.288**	**86,79**	**72,49**	**DPPKB**
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	5 Paket	28.205.000	4 Paket	14.245.352	1 Paket	3.771.792	1 Paket	609.000	1 Paket	340.000	1 Paket	807.000	1 Paket	2.011.500	1	3.767.500	5	18.012.852	100	63,86	DPPKB
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	5 Paket	447.500.000	4 Paket	204.578.840	1 Paket	273.713.028	1 Paket	-	1 Paket	97.990.000	2 Paket	-	1 Paket	167.272.040	1	265.262.040	5	469.840.880	100	104,99	DPPKB
3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	306.427.000	4 Paket	181.615.285	1 Paket	66.949.350	1 Paket	15.791.470	1 Paket	7.310.900	1 Paket	15.249.050	1 Paket	27.194.281	1	65.545.701	5	247160986	100	80,66	DPPKB
4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	306.427.000	4 Paket	43.026.750	1 Paket	10.538.910	1 Paket	1.001.000	1 Paket	2.292.225	1 Paket	1.403.200	1 Paket	4.720.550	1	9.416.975	5	52443725	100	17,11	DPPKB
5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	20 Dokumen	37.950.000	16 Dokumen	27.006.000	4 Dokumen	7.500.000	4 Dokumen	1.300.000	4 Dokumen	2.350.000	4 Dokumen	1.650.000	4 Dokumen	2.200.000	4	7.500.000	20	34.506.000	100	90,92	DPPKB
6		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	55 Laporan	61.425.000	44 Laporan	15.826.610	11 Laporan	10.000.000	3 Laporan	310.200	2 Laporan	309.100	3 Laporan	401.350	3 Laporan	8.074.000	11	9.094.650	55	24.921.260	100	40,57	DPPKB
7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	60 Laporan	1.189.080.000	48 Laporan	676.833.882	12 Laporan	276.965.000	3 Laporan	27.172.850	3 Laporan	48.679.050	3 Laporan	42.470.303	3 Laporan	112.583.500	12	230.905.703	60	907.739.585	100	76,34	DPPKB
8		Penata Usahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	47.250.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2.680.000	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	2 Dokumen	2.680.000	2	-	4	-	100,00	-	DPPKB
F		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**180 Laporan**	**822.500.000**	**144 Laporan**	**547.602.404**	**36 Laporan**	**633.000.000**	**9 Laporan**	**101.296.558**	**9 Laporan**	**117.836.709**	**9 Laporan**	**124.042.477**	**9 Laporan**	**231.867.659**	**36**	**575.043.403**	**180**	**1.122.645.807**	**100**	**136,49**	**DPPKB**
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	9.700.000	48 Laporan	4.913.000	12 Laporan	2.620.000	3 Laporan	300.000	3 Laporan	408.000	3 Laporan	408.000	3 Laporan	1.480.000	12	2.596.000	60	7.509.000	100	77,41	DPPKB
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	60 Laporan	519.400.000	48 Laporan	344.236.444	12 Laporan	111.600.000	3 Laporan	16.525.103	3 Laporan	33.633.597	3 Laporan	18.906.029	3 Laporan	36.062.975	12	105.127.704	60	449.364.148	100	86,52	DPPKB
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	60 Laporan	293.400.000	48 Laporan	198.452.960	12 Laporan	518.780.000	3 Laporan	84.471.455	3 Laporan	83.795.112	3 Laporan	104.728.448	3 Laporan	194.324.684	12	467.319.699	60	665.772.659	100	226,92	DPPKB

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 - 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit Penanggungjawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		12		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
G		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**81 Unit**	**3.107.380.000**	**81 Unit**	**1.761.909.941,07**	**81 Unit**	**1.333.403.700**	**81 Unit**	**25.536.729**	**81 Unit**	**107.133.709**	**81 Unit**	**44.366.008**	**81 Unit**	**1.092.622.975**	**81**	**1.269.659.421**	**81**	**3.031.569.362**	**100**	**97,56**	**DPPKB**
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81 Unit	987.380.000	81 Unit	565.163.353	81 Unit	179.623.300	81 Unit	11.374.034	81 Unit	47.701.642	81 Unit	29.958.530	81 Unit	88.023.119	81	177.057.325	81	742.220.678	100	75,17	DPPKB
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	265.800.000	40 Unit	153.497.282	15 Unit	47.020.000	3 Unit	675.000	3 Unit	12.265.850	3 Unit	1.360.000	6 Unit	20.179.000	15	34.479.850	55	187.977.132	110,00	70,72	DPPKB
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1.854.200.000	1 Unit	1.043.249.306,07	1 Unit	1.106.760.400	1 Unit	13.487.695	1 Unit	47.166.217	1 Unit	13.047.478	1 Unit	984.420.856	1	1.058.122.246	1	2.101.371.552	100	113,33	DPPKB
2		**Program Pengendalian Penduduk**	**Prosentase data pengendalian penduduk yang sudah valid**	**100 %**	**2.313.950.000**	**100 %**	**1.132.315.809**	**100 %**	**1.159.467.350**	**100 %**	**40.137.453**	**100 %**	**275.624.440**	**100 %**	**245.153.694**	**100 %**	**428.574.115**	**100**	**989.489.702**	**100**	**2.121.805.511**	**100**	**91,70**	**DPPKB**
A		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas**	**5 Kegiatan**	**790.000.000**	**1 Kegiatan**	**26.204.000**	**4 Kegiatan**	**215.125.450**	**4 Kegiatan**	**860.500**	**4 Kegiatan**	**29.126.550**	**4 Kegiatan**	**69.362.950**	**4 Kegiatan**	**99.550.000**	**4**	**198.900.000**	**5**	**225.104.000**	**100**	**28,49**	**DPPKB**
1		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten /Kota	1 Dokumen	290.000.000	- -	-	1 Dokumen	100.000.000	- Dokumen	860.500	- Dokumen	11.848.500	1 Dokumen	52.568.650	1 Dokumen	25.154.000	1	90.431.650	1	90.431.650	100	31,18	DPPKB
2		Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan	9 Laporan	75.000.000	3 Dokumen	26.204.000	3 Dokumen	49.294.300	- -	-	- -	-	- -	-	2 Dokumen	12.794.300	1 Dokumen	33.013.000	3	45.807.300	6	72.011.300	66,67	96,02	DPPKB
3		Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI	3 Satuan Pendidikan	5.000.000	- -	-	3 Sekolah	50.831.150	- Sekolah	-	2 Sekolah	11.235.150	1 Sekolah	4.000.000	- Sekolah	35.211.000	3	50.446.150	3	50.446.150	100	1.008,9	DPPKB
4		Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non	6 Laporan	105.000.000	- -	-	2 Laporan	15.000.000	- Laporan	-	2 Laporan	6.042.900	- Laporan	-	- Laporan	6.172.000	2	12.214.900	2	12.214.900	33,33	11,63	DPPKB
5		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 Laporan	315.000.000	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-			-		- -	-	- -	-	DPPKB
B		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang**	**60 Laporan**	**1.523.950.000**	**48 Laporan**	**1.106.111.809**	**12 Laporan**	**944.341.900**	**3 Laporan**	**39.276.953**	**3 Laporan**	**246.497.890**	**3 Laporan**	**175.790.744**	**3 Laporan**	**329.024.115**	**12**	**790.589.702**	**60,00**	**1.896.701.511**	**100,00**	**124,46**	**DPPKB**
		Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	DPPKB
1		Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan	1 Dokumen	30.000.000	- -	-	1 Dokumen	141.421.900	- Dokumen	-	1 Dokumen	31.439.400	1 Dokumen	16.767.500	1 Dokumen	50.358.450	1	98.565.350	1	98.565.350	100	328,55	DPPKB
		Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	- -	-	32 RDK	361.768.630	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	DPPKB
2		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	40.000.000	- -	-	12 Laporan	199.322.500	3 Laporan	15.050.953	3 Laporan	52.243.750	3 Laporan	36.085.600	3 Laporan	72.707.021	12	176.087.324	12	176.087.324	100,00	440,22	DPPKB
3		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	12 Data	40.000.000	12 Data	35.589.097	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	12	35.589.097	100	88,97	DPPKB
4		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	- -	-	- -	-	12 Laporan	216.000.000	- Laporan	-	6 Laporan	49.280.000	3 Laporan	33.580.000	3 Laporan	84.135.000	12	166.995.000	12	166.995.000	75,00	-	DPPKB
5		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	60 Dokumen	1.413.950.000	48 Dokumen	708.754.082	12 Dokumen	387.597.500	3 Dokumen	24.226.000	3 Dokumen	113.534.740	3 Dokumen	89.357.644	3 Dokumen	121.823.644	12	348.942.028	60	1.057.696.110	100,00	74,80	DPPKB
3		**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Persentase Peserta KB Aktif**	**80,04 %**	**74.691.909.570**	**77,43 -**	**34.424.027.878,13**	**80,04 %**	**14.964.022.300**	**77,23 %**	**620.754.198**	**77,82 %**	**3.788.337.875**	**78,05 %**	**2.410.883.572**	**77,12 %**	**7.200.442.264**	**96,35**	**14.020.417.909**	**173,78**	**48.444.445.787**	**217**	**64,86**	**DPPKB**
A		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai**	**Jumlah Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai**	**6 Kegiatan**	**10.043.164.940**	**4 Kegiatan**	**4.661.439.426**	**1 Kegiatan**	**2.145.365.000**	**1 Kegiatan**	**20.436.000**	**1 Kegiatan**	**393.060.011**	**1 Kegiatan**	**341.728.628**	**1 Kegiatan**	**1.186.225.102**	**1**	**1.941.449.741**	**5**	**6.602.889.167**	**83,33**	**65,75**	**DPPKB**
1		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada	- -	-	5 Organisasi	4.227.500	5 Organisasi	371.959.000	- Organisasi	-	5 Organisasi	31.111.900	5 Organisasi	11.942.200	5 Organisasi	282.251.000	5	325.305.100	10	329.532.600	100	-	DPPKB

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 - 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit Penanggungjawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		12		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan	- -	-	1 Kegiatan	24.361.840	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	-	-	1	24.361.840	100	-	DPPKB
3		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	18 Unit	1.445.131.660	18 Unit	378.345.250	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	-	-	18	378.345.250	100	26,18	DPPKB
3		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media	5 Dokumen	815.500.000	4 Dokumen	741.715.112	1 Dokumen	470.406.000	1 Dokumen	20.436.000	1 Dokumen	133.111.318	1 Dokumen	102.209.500	1 Dokumen	198.970.000	1	454.726.818	5	1.196.441.930	100	146,71	DPPKB
4		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi	- -	-	20 Laporan	563.013.000	20 Laporan	260.000.000	- Laporan	-	20 Laporan	51.820.000	20 Laporan	51.820.000	20 Laporan	155.460.000	20	259.100.000	20	822.113.000	100	-	DPPKB
5		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	60 Laporan	7.782.533.280	48 Laporan	2.913.715.324	12 Laporan	963.000.000	- Laporan	-	6 Laporan	177.016.793	3 Laporan	175.756.928	3 Laporan	503.697.602	12	856.471.323	60	3.770.186.647	100,00	48,44	DPPKB
6		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	- -	-	20 Laporan	36.061.400	20 Laporan	80.000.000	- Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	20 Laporan	45.846.500	20	45.846.500	20	81.907.900	100		DPPKB
B		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan IMP yang**	**5160 Orang**	**40.068.364.000**	**5160 Orang**	**20.176.162.050**	**5160 Orang**	**7.527.833.300**	**5.160 Orang**	**513.200.000**	**5.160 Orang**	**2.781.900.000**	**5160 Orang**	**576.896.000**	**5.160 Orang**	**3.599.477.450**	**5160**	**7.471.473.450**	**5160**	**27.647.635.500**	**100**	**69,00**	**DPPKB**
1		Pembinaan IMP dan Prorgam KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini	- -	-	- -	-	5 Organisasi	50.000.000	- Organisasi	-	5 Organisasi	10.000.000	5 Organisasi	10.000.000	5 Organisasi	30.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	100	-	DPPKB
2		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader KB yang Mendapatkan Pembinaan Terlaksananya Pemutakhiran Data oleh Kader dan Pelaksanaan KIE oleh Kader di Wilayah Kerjanya	5160 Orang	40.068.364.000	5160 Orang	20.176.162.050	5160 Orang	7.477.833.300	5.160 Orang	513.200.000	5.160 Orang	2.771.900.000	5160 Orang	566.896.000	5.160 Orang	3.569.477.450	5160	7.421.473.450	5160	27.597.635.500	100	68,88	DPPKB
C		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujusnya Pengendalian dan Pemakaian Alat dan Obat Kontrasepsi**	**20 Kecamatan**	**17.957.286.630**	**20 Kecamatan**	**6.530.930.802,13**	**20 Kecamatan**	**4.222.324.000**	**20 Kecamatan**	**85.118.198**	**20 Kecamatan**	**610.917.864**	**20 Kecamatan**	**1.463.802.944**	**20 Kecamatan**	**1.561.618.212**	**20**	**3.721.457.218**	**20**	**10.252.388.020**	**100**	**57,09**	**DPPKB**
1		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	60 Laporan	818.659.160	38 Laporan	133.003.332	12 Laporan	50.700.000	3 Laporan	5.902.000	3 Laporan	4.725.500	3 Laporan	14.351.500	3 Laporan	12.748.702	12	37.727.702	50	170.731.034	83,33	20,85	DPPKB
2		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	20 Kecamatan	5.821.859.700	20 Kecamatan	2.192.792.631	20 Kecamatan	2.138.424.000	20 Kecamatan	79.216.198	20 Kecamatan	409.082.364	20 Kecamatan	629.896.444	20 Kecamatan	679.113.410	20	1.797.308.416	20	3.990.101.047	100	68,54	DPPKB
3		Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	10 Laporan	42.000.000	2 Laporan	8.277.000	1 Laporan	12.500.000	- Laporan	-	1 Laporan	1.500.000	- Laporan	-	- Laporan	-	1	1.500.000	3	9.777.000	30,00	23,28	DPPKB
4		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	78 Unit	6.893.328.380	29 Unit	2.862.465.451,13	36 Unit	2.000.000.000	- Unit	-	36 Unit	191.088.000	36 Unit	819.555.000	36 Unit	854.510.100	36	1.865.153.100	65	4.727.618.551	83,33	68,58	DPPKB
5		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk	24 Laporan	575.400.000	12 Laporan	11.605.750	12 Laporan	20.700.000	- Laporan	-	6 Laporan	4.522.000	- Laporan	-	6 Laporan	15.246.000	12	19.768.000	24	31.373.750	100,00	5,45	DPPKB
6		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Akseptor KB yang dilayani	20 Kecamatan	3.806.039.390	20 Kecamatan	1.322.786.638	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	-	-	20	1.322.786.638	100	34,75	DPPKB
D		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Lembaga yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB**	**49 Kampung KB**	**6.623.094.000**	**49 Kampung KB**	**3.055.495.600**	**49 Kampung KB**	**1.068.500.000**	**49 Kampung KB**	**2.000.000**	**49 Kampung KB**	**2.460.000**	**49 Kampung KB**	**28.456.000**	**49 Kampung KB**	**853.121.500**	**49**	**886.037.500**	**49**	**3.941.533.100**	**100**	**59,51**	**DPPKB**
1		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di	49 Kampung KB	341.000.000	- -	-	284 Dokumen	9.000.000	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	DPPKB
2		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terwujudnya Biaya Operasional Penggerakan di kampung KB	49 Kampung KB	6.282.094.000	49 Kampung KB	3.055.495.600	49 Kampung KB	1.059.500.000	49 Kampung KB	2.000.000	49 Kampung KB	2.460.000	49 Kampung KB	28.456.000	49 Kampung KB	853.121.500	49	886.037.500	49	3.941.533.100	100	62,74	DPPKB

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 - 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit Penanggungjawab
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		12		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
4		**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Prosentase Keluarga Ber KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)**	**85,00**	**%**	**6.282.094.000**	**88,13**	**%**	**6.489.395.696**	**85,00**	**%**	**6.677.747.800**	**89,71 %**	**8.019.423**	**91,34 %**	**1.135.656.957**	**84,18 %**	**1.897.651.686**	**79,80 %**	**3.475.416.230**	**93,88**	**6.516.744.296**	**182,01**	**13.006.139.992**	**214,13**	**207,04**	**DPPKB**
			Prosentase Keluarga Ber KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)	**85,00**	**%**		**77,49**	**%**		**85,00**	**%**		**66,27 %**		**59,88 %**		**72,63 %**		**45,97 %**		**54,08**		**131,57**		**154,79**		
			Prosentase Keluarga Ber KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)	**85,00**	**%**		**77,13**	**%**		**85,00**	**%**		**81,25 %**		**70,97 %**		**31,96 %**		**6,58 %**		**7,74**		**84,87**		**99,85**		
			Prosentase Keluarga Ber KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan UPPKA	**85,00**	**%**		**79,63**	**%**		**85,00**	**%**		**73,81 %**		**64,19 %**		**71,25 %**		**33,19 %**		**39,05**		**118,68**		**139,62**		
			Menurunnya presentase pernikahan dibawah usia 21 tahun bagi wanita 25 tahun bagi	**11,20**	**%**		**7,51**	**%**		**11,20**	**%**		**6,41 %**		**5,26 %**		**7,77 %**		**7,05 %**		**158,87**		**166,38**		**1.485,49**		
A		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kelompok Kegiatan yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**5 Kelompok Kegiatan**		**6.282.094.000**	**5 Kelompok Kegiatan**		**6.489.395.696**	**5 Kelompok Kegiatan**		**6.677.747.800**	**5 Kelompok Kegiatan**	**8.019.423**	**5 Kelompok Kegiatan**	**1.135.656.957**	**5 Kelompok Kegiatan**	**1.897.651.686**	**5 Kelompok Kegiatan**	**3.475.416.230**	**5**	**6.516.744.296**	**5**	**13.006.139.992**	**100**	**207,04**	**DPPKB**
1		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	78	Unit	926.800.000	91	Unit	1.238.467.350	40	Unit	520.000.000	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	40 Unit	372.980.000	40	372.980.000	131	1.611.447.350	167,55	173,87	DPPKB
2		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	20	Orang	860.200.000	20	Orang	253.137.444	20	Orang	202.235.600	20 Orang	8.019.423	20 Orang	14.354.957	20 Orang	49.195.186	20 Orang	122.287.130	20	193.856.696	20	446.994.140	100	51,96	DPPKB
3		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	20	Kecamatan	2.010.494.000	20	Kecamatan	3.588.773.122	2550	Orang	5.355.000.000	- Orang	-	2.550 Orang	1.071.000.000	2.550 Orang	1.581.000.000	2.550 Orang	2.703.000.000	2.550	5.355.000.000	2.550	8.943.773.122	100	444,85	DPPKB
4		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	25	Laporan	1.838.750.000	20	Laporan	886.336.730	5	Laporan	405.457.200	- Laporan	-	2 Laporan	46.611.250	2 Laporan	203.931.800	1 Laporan	150.132.100	5	400.675.150	25	1.287.011.880	100	69,99	DPPKB
5		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	5	Laporan	645.850.000	4	Laporan	522.681.050	1	Laporan	195.055.000	- Laporan	-	1 Laporan	3.690.750	1 Laporan	63.524.700	- Laporan	127.017.000	1	194.232.450	5	716.913.500	100	111,00	DPPKB
		JUMLAH				**96.627.959.062**			**52.967.925.772,20**			**29.864.477.230**		**1.301.360.610**		**6.688.883.896**		**5.704.449.967**		**14.263.276.968**		**27.957.971.441**		**80.925.897.213**		**83,75**	
																					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**93,62%**				
																					Predikat Kinerja	**Rendah**				

*Catatan :

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Komitmen Dinas PPKB untuk terus berupaya dalam meningkatkan kinerja

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Masih belum optimalnya proses capaian kinerja s.d Triwulan IV Tahun Anggaran 2023

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Percepatan penyerapan angggaran dan capaian kinerja bisa lebih baik pada Tahun berikutnya

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Tahun Berikutnya : Mengevaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta mengatasi permasalahan yang ada ditahun sebelumnya sehingga sasaran, target, output dan outcome dapat tercapai

Nganjuk, 10 Januari 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK

NAFHAN TOHAWI, S.H. M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 199803 1 005